



**PERJUANGAN RAKYAT MAGELANG DALAM
MEPERTAHANKAN KEMERDEKAAN TAHUN
1947-1949**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sejarah
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh
Asmiyatun
NIM 3101401017**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN SEJARAH
2005**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. AJ. Sumarmo
NIP.130340222

Dra. Santi Muji U, M.Hum
NIP.131876210

Mengetahui:
Ketua Jurusan Sejarah

Drs. Jayusman, M.Hum
NIP. 131764053

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 22 Oktober 2005

Penguji Skripsi

Dra. Rr. Sri Wahyu S, M.Hum
NIP. 132 010 313

Anggota I

Anggota II

Drs. AJ. Sumarmo
NIP.130 340 222

Dra. Santi Muji U, M.Hum
NIP.131 876 210

Mengetahui:
Dekan,

Drs. Sunardi, MM
NIP. 130 367 998

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi atau tugas akhir ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

Asmiyatun
NIM 3101401017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ✓ Berilah diri kita kesempatan berdamai dengan kesalahan agar kita dapat memperbaiki hidup, mencoba menjadi pribadi yang lebih baik dengan berfikir positif dan bertanggungjawab
- ✓ Dunia terus berputar dan waktupun terus bergulir, teruslah melangkah memutar otak jika kau tak ingin menjadi ”manusia biasa”

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT kripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku atas cinta, pengorbanan dan do'a yang tak pernah berhenti

Kakakku, mas Nasim dan mas Kris, ”pengalaman hidup telah mengajari Az
banyak hal ” serta adikku dek Listy, you are my spirit

Keluarga besar ”Mbah Suhadi”, tanpa mereka Az tidak akan bertahan
sampai sekarang

Mase Kemat yang tak pernah lepas dari benakku, atas motivasi dan
pengertiannya

Mas Meng thanks for all, cah bagusku Syukron miss u emuuuaaaaah.....
dan sobat kecilku Wida

Sobat-sobat istimewa; Retno, Dian, Rovi, Watik, Yuni, Anti, Baroroh, Robi,
Irvan, kedua adikku Rian-Topo (AztRy), ”cinta, tak ada hubungan seindah
sahabat baik”

Teman-teman BP2M kalianlah sumber inspirasiku, keluarga besar kos
”Griha Gharini”

Teman-teman Pendidikan Sejarah '01

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil'alamain,

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNYA sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul perjuangan rakyat Magelang dalam mempertahankan kemerdekaan tahun 1947-1949. Dan solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menempuh Studi Srtata I di Universitas Negeri Semarang guna meraih gelar Sarjana Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

Penulis mengakui bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak pernah terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. H. A.T. Sugito, SH. MM, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sunardi MM, Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Jayusman M.Hum, Ketua Jurusan Sejarah.
4. Drs.A.J. Sumarmo, pembimbing I yang telah memberi pengarahan, membimbing, dan memotivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dra. Santi Muji Utami, M.Hum, Pembimbing II atas bimbingan, pengarahan dan motivasi serta do'anya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dra. Rr. Sri. Wahyu S, M.Hum, dosen penguji yang telah memberi masukan dalam penyempurnaan penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen Sejarah yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya.

8. Anggota veteran Kabupaten dan kota Magelang atas informasi dan bantuannya
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuannya.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang,

Penyusun

SARI

Asmiyatun.2005.Perjuangan rakyat Magelang dalam mempertahankan kemerdekaan tahun 1947-1949. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 82 halaman.

Kata kunci: Sejarah Perjuangan

Magelang terletak di sebelah utara Jogjakarta. Sejak tanggal 4 Januari 1946, Jogjakarta merupakan ibu kota RI. Pada masa perang kemerdekaan tahun 1947-1949, Magelang digunakan sebagai jalan masuk pasukan Belanda dari arah Semarang dan Purworejo. Oleh karena itu posisi Magelang memiliki arti penting dalam usaha menghadang kedatangan pasukan Belanda tersebut dan berusaha mempertahankan penguasaan kembali Belanda atas Magelang.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kondisi Magelang menjelang Agresi Militer Belanda I tahun 1947, bagaimana perjuangan rakyat Magelang dalam menghadapi Agresi Militer Belanda I tahun 1947, bagaimana kondisi Magelang menjelang Agresi Militer Belanda II tahun 1948-1949, bagaimana perjuangan rakyat Magelang dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II tahun 1948-1949, bagaimana kondisi Magelang setelah Agresi Militer Belanda II tahun 1949. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui kondisi Magelang menjelang Agresi Militer Belanda I tahun 1947 perjuangan rakyat Magelang dalam Agresi Militer Belanda I tahun 1947, mengetahui kondisi Magelang menjelang Agresi Militer Belanda II tahun 1948-1949, mengungkapkan perjuangan rakyat Magelang dalam mempertahankan kemerdekaan II tahun 1948-1949, mengungkapkan keadaan Magelang sesudah Agresi Militer Belanda II tahun 1948-1949.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup ruang lingkup spatial, temporal dan tematikal. Lingkup Spatial adalah hal yang berkaitan dengan batasan daerah dimana suatu peristiwa sejarah terjadi. Pada penelitian ini wilayah yang penulis maksud adalah wilayah Magelang. Lingkup Temporal adalah berkaitan dengan batasan waktu penelitian. Dalam penelitian ini waktu yang dimaksud adalah sejak pecahnya Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan Agresi Militer Belanda II tahun 1948-1949. Lingkup Tematikal yaitu sejarah perjuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Meliputi langkah-langkah heuristik, mencakup sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah kesaksian para pelaku yang sekarang tergabung dalam anggota veteran Kabupaten Magelang. Sumber sekunder yang digunakan adalah kajian pustaka. Langkah selanjutnya adalah kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kondisi Magelang yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit sangat penting untuk mengatur strategi perang, yaitu gerilya. Pada masa perang kemerdekaan semua badan-badan perjuangan Magelang dikerahkan ke seluruh front. Diantaranya ke front Ngablak, front Ngasinan, front Pingit, front Nglarangan (Grabag), front Candiroto, front-front di Surakarta, Semarang dan kota-kota lain. Tidak hanya terbatas pada front Jawa Tengah tetapi juga diperbantukan pada front di luar Jawa Tengah seperti di Purwakarta (Jawa Barat), di Karawang dan sebagainya.

Di masa perang gerilya peranan rakyat sangat besar. Serangan-serangan mendadak dan penghadangan-penghadangan hampir tiap hari terjadi. Dan ini dilakukan dengan bantuan penuh dari rakyat. Rakyat tidak hanya ikut memanggul senjata dalam perang tetapi juga membantu dalam bentuk materi, misalnya dengan mendirikan dapur umum untuk menjamin makanan bagi para gerilyawan dan mempersiapkan tempat-tempat pembagian makan maupun markas untuk sementara. Serangan mendadak, pengrusakan gedung dan jembatan, penebangan pohon-pohon untuk menghadang datangnya pasukan Belanda dikerjakan oleh rakyat dengan bimbingan pasukan TNI.

Belanda berhasil menduduki Magelang selama kurang lebih satu tahun. Setelah mendapatkan serangan yang terus menerus dari rakyat, akhirnya Belanda berhasil diusir dari Magelang. Kepergian Belanda dari Magelang juga seiring dengan hasil kesepakatan antara RI dengan Belanda tentang penyerahan kedaulatan RI dari Belanda ke Republik Indonesia melalui persetujuan Roem-Royen. Di Magelang penyerahan pemerintahan dari militer ke sipil dilakukan setelah Belanda benar-benar pergi dari kota Magelang dan bersamaan dengan penandatanganan naskah kedaulatan dari pemerintah Belanda di Belanda, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan dan Manfaat	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II	GAMBARAN UMUM KABUPATEN MAGELANG MENJELANG AGRESI MILITER BELANDA TAHUN 1947-1949.	
	A. Letak Geografis Kabupaten dan kota Magelang	19
	B. Kondisi Sosial Ekonomi Kabupeten dan Kota Magelang	22
	C. Kondisi Politik Kabupaten dan Kota Magelang	24
BAB III	PERJUANGAN RAKYAT MAGELANG DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN TAHUN 1947	
	A. Perjuangan Rakyat Magelang Mempertahankan Kemerdekaan Tahun 1945.....	29
	1. Insiden Merah Putih di Hotel Nitaka.....	32
	2. Insiden di Jalan Tidar	33
	3. Pelucutan Senjata tentara Jepang	34
	4. Perjuangan Menghadapi Sekutu di Magelang	36
	B. Perjuangan Rakyat Magelang Mempertahankan Kemerdekaan Tahun 1947.....	38
	1. Rencana Pendudukan Kembali Indonesia oleh Belanda	38
	2. Agresi Militer Belanda Belanda I Tahun 1947.....	42
	3. Partisipasi Rakyat Magelang dalam Agresi Militer Belanda I.....	47
	..	

BAB IV	PERJUANGAN RAKYAT MAGELANG MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN TAHUN 1948/1949	
A.	Situasi Magelang Setelah Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan Menjelang Agresi Militer Belanda II Tahun 1948/1949.....	54
B.	Agresi Militer Belanda II Tahun 1948/1949.....	60
C.	Perjuangan Rakyat Magelang Melawan Belanda Tahun 1948/1949.....	63
1.	Pemboman 3 Jembatan di Magelang.....	63
2.	Kota Magelang Dibumihanguskan.....	66
3.	Strategi Gerilya Rakyat Magelang	70
D.	Akhir Pendudukan Belanda dan Situasi Pemerintahan di Magelang Pasca Agresi Militer Belanda II.....	74
BAB V.	PENUTUP	
A.	Simpulan	79
B.	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....		81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		82

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Data informan
- Lampiran II : Instrumen
- Lampiran III : foto-foto
- Lampiran IV : Surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Negeri Semarang
- Lampiran V : Surat izin penelitian dari Kesbag dan Linmas Kabupaten
Magelang
- Lampiran VI : Surat izin penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan
Derah Kabupaten Magelang

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Bapak Muh. Sakeh
- Gambar 2 : Bapak H. Suswanto
- Gambar 3 : Bapak Soedjoed Mangkudihardjo
- Gambar 4 : Bapak Muhsinun
- Gambar 5 : Bapak Ruslan
- Gambar 6 : Bapak Sutarmo
- Gambar 7 : Bapak Yatimin
- Gambar 8 : Bapak Sapuan
- Gambar 9 : Bapak Zakaria
- Gambar 10 : Bapak Kariyo Mudji
- Gambar 11 : Bekas tangsi Belanda
- Gambar 12 : Bekas markas Hizbullah Sabilillah daerah Muntilan
- Gambar 13 : Jembatan sungai Progo
- Gambar 14 : Jembatan sungai Elo
- Gambar 15 : Gereja di sebelah utara alun-alun
- Gambar 16 : Menara air Magelang
- Gambar 17 : Jalan raya Banaran
- Gambar 18 : Jalan raya Secang-Magelang
- Gambar 19 : Jalan raya Pingit
- Gambar 20 : Jembatan sungai Brangkal di Grabag
- Gambar 21 : Monumen Bambu Runcing di Muntilan
- Gambar 22 : Gunung Tidar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap bangsa memiliki dan menulis sejarahnya sendiri, begitu juga bangsa Indonesia yang sejarahnya syarat dengan perjuangan dan perlawanan menentang penjajah. Proses perjuangan rakyat mengusir kekuasaan kolonialisme-imperialisme yang berabad-abad mencengkeram kehidupan rakyat dan bangsa telah mencapai titik klimaknya dengan gelora cetusan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 (Nasution,1964: 119).

Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 pada hakikatnya adalah suatu komando nasional pada rakyat untuk bangkit serentak merebut kekuasaan dari tangan penjajah Jepang (Moehkardi, 1983: 33). Sedangkan menurut AJ. Sumarmo, bagi Indonesia proklamasi kemerdekaan pada hakikatnya merupakan komando revolusi. Komando merebut kekuasaan dari tangan tentara Jepang maupun kekuasaan atas alat-alat perlengkapan Negara (Sumarmo.1991: 82).

Proklamasi kemerdekaan tersebut merupakan titik kulminasi didalam perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 lahirlah Indonesia menjadi suatu negara dan bangsa yang merdeka. Setelah itu perjuangan bangsa Indonesia memasuki tahap baru, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan

terhadap ancaman Belanda yang ingin menguasai kembali bumi Nusantara. Usaha mempertahankan kemerdekaan tidaklah mudah melainkan harus disertai tekad dan pengorbanan besar yang dijiwai semangat patriotik dan nasionalisme Indonesia (Tjokroponolo, 1992: 43).

Sikap pemerintah RI semula cenderung kepada sikap perjuangan diplomasi dalam rangka usaha menanggulangi ancaman bahaya penjajahan kembali Belanda yang membonceng Sekutu, sehingga pada awal tahun 1946 Pemerintah RI merintis perjuangan diplomasi untuk mendapat pengakuan internasional. Oleh sebab itu, pada tahun 1946 diadakan genjatan senjata melalui perundingan Linggarjati. Persetujuan ini baru tercapai tanggal 15 November 1946 yang naskahnya baru ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Gambir Jakarta (Dinas Sejarah Kodam VIII/ Diponegoro. 1977: 265).

Dengan dicapainya persetujuan Linggarjati ini, untuk sementara pertentangan antara RI dan Belanda dapat dihentikan. Namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami hambatan. Pihak RI menuduh bahwa pasukan Belanda sering melakukan aksi sepihak di beberapa wilayah RI. Demikian juga Belanda menuduh pihak RI telah melakukan aksi pelanggaran yaitu dengan menjalin hubungan dengan dunia luar.

Sebagai puncak pertentangan, Belanda melancarkan Agresi Militer I di seluruh wilayah RI. Gerakan militer ini dimulai secara serentak pada tanggal 21 Juli 1947 di kota-kota terpenting di Sumatera, Jawa dan Madura. Rakyat Indonesia tidak tinggal diam dalam usaha penguasaan kembali

Belanda di wilayah RI. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan ini telah melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari perkotaan hingga ke pelosok desa, berbentuk revolusi nasional maupun lokal. Revolusi nasional bertujuan merebut kekuasaan dari pemerintah kolonial ke pemerintah sendiri. Sedangkan revolusi di tingkat lokal merupakan revolusi yang bergejolak di daerah-daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mendobrak kekuasaan pemerintah kolonial yang mengakar kuat di daerah-daerah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Salah satu bentuk perlawanan daerah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan adalah perjuangan rakyat Magelang. Ketika terjadi perjuangan fisik laskar rakyat yang berada di perkotaan sampai desa turut berjuang mempertahankan republik Indonesia termasuk juga di Magelang.

Magelang sebagai salah satu ibu kota karesidenan di Jawa Tengah tidak luput pula dari incaran Belanda sehingga rakyat melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi kedatangan pasukan Belanda. Di daerah Magelang dibagi menjadi 2 medan pertahanan, yaitu medan Pertahanan Barat (tertutup) dan medan pertahanan timur (terbuka). Pembagian ini didasarkan pada letak geografis daerah Magelang dan pemusatan pemerintah sipil maupun militer sehingga dapat diketahui letak konsentrasi kekuatan TNI.

Pertama, medan pertahanan barat daerahnya adalah sepanjang sungai Progo yang mengalir ke arah selatan, meliputi kecamatan Bandongan, Windusari, Kajoran yang terletak di lereng gunung Sumbing, dimana banyak

pegunungan yang saling berdekatan sehingga sangat bermanfaat untuk tempat perlindungan dari serangan pesawat terbang maupun meriam.

Kedua, medan pertahanan timur cenderung bersifat terbuka karena daerah ini jarang terdapat hutan yang tumbuh di daerah pegunungan seperti di daerah pertahanan barat. Daerah ini meliputi kecamatan Tegalrejo, Pakis, Candimulyo, Srumbung, dan Grabag (Priadji.1997: 73).

Perlawanan dilakukan karena Belanda ingin mengembalikan kekuasaan penjajahan tetapi bangsa Indonesia menolaknya. Rakyat Magelang dan sekitarnya berjuang mengusir Belanda agar tidak mengalami penjajahan lagi. Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947 telah mengundang reaksi dari dunia internasional sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dengan membentuk Komite Tiga Negara (KTN). KTN ini bertugas menyelesaikan sengketa Indonesia dengan Belanda. Atas prakarsa dari KTN diadakan perundingan antara Indonesia-Belanda, sehingga pada tanggal 17 Januari 1948 ditandatangani perjanjian Renville yang isinya sangat merugikan Pemerintahan Republik Indonesia. Akibat perjanjian Renville wilayah Republik Indonesia semakin sempit dan kedudukan militer menjadi terkepung, ditambah dengan suhu politik yang semakin meningkat dengan meletusnya pemberontakan PKI di Madiun. Situasi demikian mendorong Belanda untuk semakin menekan Pemerintah RI dengan melancarkan Agresi Militer II.

Pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda melancarkan Agresinya yang kedua. Serangan dibuka di lapangan terbang Maguwo dan diteruskan ke perut kota Yogyakarta, Ibukota RI berhasil dikuasai dan para pemimpin RI

ditawan (AH. Nasution, 1979: 67). Sementara itu pasukan Belanda yang berkedudukan di Gombong sejak Agresi militer Belanda I, mulai bergerak ke arah timur menuju Purworejo dan selanjutnya ke Magelang.

Berita penyerangan Belanda di Jogjakarta ini telah sampai di kecamatan Salam. Untuk menghadapi gerak maju pasukan Belanda menuju Magelang, TNI dan pemuda-pemuda desa Salam berusaha memutus jembatan sungai Krasak, yang menghubungkan antara kabupaten Magelang dan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Jogjakarta. Jembatan ini diputus dengan cara dibom, namun ternyata jembatan itu tidak putus dan hanya berlubang. Sesuai dengan dugaan para pemuda, sesaat kemudian pasukan Belanda tiba di desa Salam tanpa mendapat perlawanan.

Kota Magelang merupakan daerah pertahanan untuk menghadang kedatangan Belanda dari arah Gombong-Purworejo, Purworejo-Banjarnegara dan Ambarawa-Semarang (Nasution.1979: 201). Bertolak dari itulah penulis ingin mengangkat dan mengadakan penelitian mengenai **“PERJUANGAN RAKYAT MAGELANG DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN TAHUN 1947-1949”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana kondisi geografis, sosial ekonomi dan politik Magelang menjelang Agresi Militer Belanda I tahun 1947?
2. Bagaimana perjuangan rakyat Magelang dalam menghadapi Agresi Militer Belanda I tahun 1947?
3. Bagaimana kondisi Magelang setelah Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan menjelang Agresi Militer Belanda II tahun 1948-1949?
4. Bagaimana perjuangan rakyat Magelang dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II tahun 1948-1949?
5. Bagaimana kondisi Magelang setelah Agresi Militer Belanda II tahun 1949.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sebuah penelitian sejarah bila akan disusun sebagai hasil karya sejarah, maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup yang akan diteliti. Ruang lingkup penelitian ini mencakup ruang lingkup spatial, temporal dan tematikal. Supaya tidak terjadi salah pengertian tentang judul skripsi ini dan tidak meluas, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup tentang “Perjuangan Rakyat Magelang Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Tahun 1947-1949”.

1. Lingkup Spatial

Adalah hal yang berkaitan dengan batasan daerah dimana suatu peristiwa sejarah terjadi. Pada penelitian ini wilayah yang penulis maksud adalah wilayah Magelang. Magelang merupakan salah satu daerah tingkat II di eks karesidenan yang akan dijadikan obyek dalam penelitian ini. Pada saat Agresi Militer Belanda I dan II, kota Magelang merupakan daerah pertahanan untuk menghadang kedatangan Belanda dari arah Gombang-Purworejo, Purworejo-Banjarnegara dan Ambarawa-Semarang.

2. Lingkup Temporal

Adalah berkaitan dengan batasan waktu penelitian. Dalam penelitian ini waktu yang dimaksud adalah sejak pecahnya Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan Agresi Militer Belanda II tahun 1948-1949.

3. Lingkup Tematikal

Lingkup tematikal dalam penulisan skripsi ini adalah sejarah perjuangan. Perjuangan diartikan dengan gerakan yang bertujuan memperjuangkan nasib bangsa untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan (Dekker,1975:3). Berjuang lebih luas sifatnya dari pada gerakan sebab perjuangan masih dilanjutkan dalam rangka mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu sendiri.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui kondisi Magelang menjelang Agresi Militer Belanda I tahun 1947.
- b. Mengungkapkan perjuangan rakyat Magelang dalam Agresi Militer Belanda I tahun 1947.
- c. Mengetahui kondisi Magelang setelah Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan menjelang Agresi Militer Belanda II tahun 1948-1949.
- d. Mengungkapkan perjuangan rakyat Magelang dalam mempertahankan kemerdekaan II tahun 1948-1949.
- e. Mengungkapkan keadaan Magelang sesudah Agresi Militer Belanda II tahun 1948-1949.

2. Manfaat

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kasanah penelitian sejarah local serta sumbangan kepada sejarah nasional.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan I dan II di daerah Magelang sebagai sejarah lokal.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dan meneladani semangat kepalawanan.

E. Tinjauan Pustaka

Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdianya (1977). Disusun oleh Dinas Sejarah Militer Kodam VII/ Diponegoro. Membahas tentang sejarah rumpun Diponegoro dan pengabdianya terhadap bangsa Indonesia dan negara. Dalam buku ini disebutkan bahwa yang dimaksud rumpun Diponegoro adalah setiap prajurit yang sedang dan pernah bernaung dibawah Divisi Kodam VII Diponegoro. Warga rumpun Diponegoro adalah sekelompok warga TNI yang tidak akan lepas dari induknya dan yang dilahirkan serta didewasakan disatu daerah, disatu kesatuan dan disatu iklim dengan dijiwai oleh semangat Pahlawan Diponegoro. Rumpun Diponegoro adalah sebutan yang lazim dipergunakan sebagai sebutan corps Diponegoro atau merupakana wadah paguyuban dari warga Komando Daerah Militer VII/ Diponegoro.

Buku di atas membahas perjuangan Pangeran Diponegoro terutama perjuangan untuk bangsa dan negara dengan menentang penjajahan Belanda. Perjuangannya dilandasi dengan semangat *fi sabilillah* melawan kezaliman dan kelaliman pihak asing. Selain itu buku ini juga membahas mengenai peristiwa-peristiwa sekitar perjuangan dalam menghadapi Agresi Militer Belanda I dan II tahun 1947-1949. Gerakan Belanda ini bertujuan melenyapkan riwayat RI dan TNI-nya. Gerakan ini tidak saja mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia tetapi juga telah menimbulkan reaksi-reaksi spontan di luar negeri yang mengecam gerakan Belanda ini.

Data dalam buku ini sangat terbatas terutama dengan sumber pustaka. Sumber tersebut diperoleh dari JARAHDAM VII/Diponegoro dan

JARAH CAB REM 072/ Pamungkas, dikarenakan keterbatasan waktu dan dokumen yang ada.

Sirnaning Jakso Katon Gapuraning Ratu (1978). Ditulis oleh Dinas Militer KODAM VII/ Diponegoro. Membahas tentang peristiwa sekitar Agresi Militer Belanda I dan II tahun 1947-1949. Buku ini menggambarkan semangat rakyat di daerah-daerah untuk tetap setia kepada Republik Indonesia.

Dalam salah satu bab buku ini membahas bahwa dalam serangannya di Jawa Tengah, Belanda menggunakan pasukan dari brigade "T". Gerakan militer Belanda dilancarkan serentak dan dapat dibagi menjadi beberapa gerakan, sebagai berikut:

- a. Gerakan dari Semarang menuju ke arah barat, selatan dan timur
- b. Gerakan dari Cirebon Jawa Barat
- c. Gerakan dari pantai Cilacap

Gerakan dari Semarang ke selatan terhambat di Sronol karena dipasang ranjau. Pada malam harinya pasukan Belanda dapat sampai ke Ungaran. Gerakan Belanda ke selatan terhambat karena jembatan telah rusak dan mendapat perlawanan. Gerakan masuk ke selatan dilakukan pasukan Belanda sampai tanggal 4 Agustus 1947 dan akhirnya berhenti di Sumowono.

Buku ketiga yang digunakan adalah buku yang berjudul "*Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia; edisi Agresi Militer Belanda I (jilid 5)*" (1978). Karangan A.H. Nasution. Membahas tentang peristiwa-peristiwa seputar agresi Militer Belanda I.

Dalam buku ini dibahas mengenai kedatangan kembali Belanda ke Indonesia dengan membonceng tentara Sekutu. Disini dinyatakan bahwa Van Mook mempunyai alat NICA-nya yang disisipkan di markas-markas Sekutu untuk menjadi alat pemerintah sipil, sehingga dengan perlindungan Sekutu, ia dapat memulai menegakkan kembali Hindia Belanda di daerah-daerah yang baru direbut tentara Sekutu. Kemudian diungkapkan juga sikap rakyat Indonesia dalam menanggulangi kedatangan kembali Belanda ke Indonesia. Semua pemerintah bersikap mengambil jalan diplomasi tetapi Belanda tak dapat ditolelir sehingga timbul perlawanan-perlawanan di berbagai daerah termasuk di Jawa Tengah seperti pertempuran di Magelang, Banyubiru dan Ambarawa.

Pada malam hari menjelang tanggal 21 Juli 1947 Belanda mulai menyerang Republik Indonesia dari segala jurusan dengan mengerahkan Angkatan Darat, Laut dan Udaranya. Tanggal 21 Juli 1947, pukul 07. 55 WIB sebuah bomber Belanda terbang di atas Magelang dan menyebarkan pamflet yang sama isinya dengan pamflet yang disebar di Cirebon dan Banyuwangi. Pamflet-pamflet itu ditandatangani oleh van Mook. Berita pertama dari front Semarang mengatakan bahwa Belanda pada pukul 07. 30 WIB mulai melancarkan serangan dengan didahului bombardemen, diantaranya di Gunungpati (sektor barat daya) (Nasution, 1978: 101).

Tanggal 22 Juli 1947 sasaran musuh adalah Tuntang dan Bringin untuk merebut pusat Tenaga Listrik dan Ambarawa-Bedono di jalan raya ke Magelang. Sementara tanggal 23 Juli pukul 13.15 kota Magelang diserang oleh pesawat pemburu Belanda yang melepaskan tembakan-tembakan metralyur dan

mejatuhkan granat tangan. Pesawat-pesawat itu mengadakan pula serangan-serangan terhadap Blabag. Granat-granat itu jatuh di tengah sawah dan tidak menimbulkan korban. Pukul 13. 30 WIB Belanda mengadakan serangan udara terhadap Pringsurat Temanggung.

Buku lain yang penulis anggap sesuai dengan tema diatas adalah "*Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia; edisi Agresi Militer Belanda II (jilid 9)*" (1979). Karangan A.H. Nasution. Buku ini membahas bahwa menurut pasal 17 dari perjanjian Renville, pasukan-pasukan dilarang untuk melewati garis status-quo. Tetapi pihak Belanda oleh Kepala Staf Tentara Belanda memberikan kekuasaan kepada komandan-komandan daerahnya untuk mengambil tindakan-tindakan dengan melalui garis status-quo. Di daerah Semarang, Belanda menyiapkan 2 brigade untuk menyerang Jogjakarta dan Surakarta. Sebagian dari pasukan ini akan dipakai sebagai pasukan bantuan dalam gerakan ke jurusan Magelang, dan sebagian lagi ke Karesidenan Pati. Di Banyumas disiapkan satu brigade lain untuk penyerbuan ke daerah Kedu.

Bagi bangsa Indonesi telah yakin bahwa Agresi Militer Belanda II akan terjadi. Karena itu dipercepat pembuatan instruksi Panglima Besar tanggal 9 November 1945 dan konferensi dengan semua komandan daerah, gubernur dan residen pada tanggal 11 November 1948. Dalam konferensi ini dijelaskan tindakan-tindakan yang harus diambil. Atas dasar ini maka tiap-tiap daerah masih sempat mengadakan tindakan-tindakan persiapan yang sama sehingga kita tinggal menunggu saja saatnya.

Arah pertahanan divisi II dan III di Jawa Tengah mengikuti jalan raya yang menuju ke Semarang-Purwokerto. Sejak hari-hari terakhir telah dimulai mengadakan rintangan-rintangan dan perusakan-perusakan jalan sepanjang kurang lebih 10 km dengan samaran latihan umum.

Buku-buku tersebut penting untuk diperhatikan, karena dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membahas peristiwa Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan Agresi militer Belanda II tahun 1948/1949. Selain itu dalam beberapa sub bab membahas tentang peranan rakyat Magelang dalam mempertahankan kemerdekaan tahun 1947 dan 1948/1949.

Penelitian untuk studi ini sepenuhnya difokuskan pada peranan rakyat Magelang dalam Perang Kemerdekaan I tahun 1947 dan Perang Kemerdekaan II tahun 1948/1949. Peranan rakyat Magelang pada masa ini menurut penulis sangat menarik karena Magelang dijadikan sebagai jalan masuknya pasukan Belanda ke arah selatan yaitu menuju ibu kota RI, Jogjakarta.

Dari uraian tersebut kiranya dapat dijadikan gambaran global tentang apa yang akan dikaji. Karena tinjauan pustaka merupakan kajian terhadap buku-buku yang berisi uraian peristiwa yang mendukung pada penulisan ilmiah, sehingga berguna sebagai arahan dan pijakan pada penulisan-penulisan ilmiah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian sejarah, karena penelitian ini berhubungan dengan kenyataan yang terjadi pada masa lampau. Pengertian metode penelitian sejarah disini adalah suatu proses yang menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan pada masa lampau (Gottscalk,1975:32).

Menurut Nugroho Notosusanto, metode penelitian sejarah adalah prosedur dari sejarah yang melukiskan kisah masa lampau itu, yang terdiri dari (1) mencari jejak-jejak masa lampau, (2) meneliti jejak secara kritis berdasarkan informasi yang diberikan oleh jejak-jejak itu untuk berusaha membayangkan bagaimana rupa masa lampau itu berdasarkan interpretasi, (3) menyampaikan hasil imajinatif ilmiah (Notosusanto, 1971: 19).

Adapun langkah-langkah penulisan Sejarah adalah sebagai berikut:

2. Heuristik

Tahap ini merupakan kegiatan untuk menghimpun, menyelidiki dan mengadakan penelitian terhadap data yang telah dikumpulkan, apakah data tersebut akurat atau tidak mengenai isi maupun nilai kenyataannya.

Klasifikasi sumber yaitu:

a. Sumber Primer

Adalah kesaksian dari seseorang saksi dengan mata kepala sendiri atau alat mekanis lain seperti diktafon,yaitu alat atau orang yang hadir pada peristiwa sejarah (Gottscalk, 1973: 35). Selain diktafon juga

dan bentuk lain seperti dokumen, arsip, berita-berita perintah dan naskah perjuangan.

b. Sumber Sekunder

Adalah sumber yang berasal dari orang yang bukan saksi hidup (Wiyono,1990:4). Penulis menggunakan sumber sekunder yaitu dengan kajian pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan karena keterbatasan waktu, biaya dan kesulitan mendapatkan saksi hidup untuk diwawancarai.

Kajian pustaka yang penulis gunakan didapatkan dari:

1. Museum Mandala Bakti
2. Perpustakaan jurusan Sejarah FIS Unnes
3. Perpustakaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah
4. Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang
5. Perpustakaan Daerah Kota Magelang
6. Kantor Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang
7. Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

3. Kritik Sumber

Kritik sumber adalah penggunaan dan penerapan dari sejumlah aturan atau prinsip untuk menguji kebenaran atau keaslian dari sumber-sumber sejarah, mengembalikan mereka sejauh mungkin dari bentuk aslinya dan menetapkan sejauh mungkin dari bentuk yang sebenarnya (Garragan,

1957:168). Kritik sumber merupakan tahap penilaian seperti dokumen, arsip, berita-berita perintah dan naskah perjuangan.

Kritik sumber ada dua, yaitu;

1. Kritik dalam

Bertujuan untuk menyaring kualitas keterangan yang didapat dari sumber sejarah dimana dilakukan (cross cek) (Widja. 1989: 25). Dalam hal ini penulis membandingkan antara keterangan dari satu informan dengan informan yang lain kemudian memilih keterangan yang paling banyak disampaikan oleh informan.

2. Kritik luar

Yaitu kritik yang digunakan untuk menguji otentisitas asli tidaknya sumber yang dipakai untuk menetapkan keaslian sumber sejarah, misalnya kapan, di mana peristiwa, dan dari bahan apa sumber ditulis. Hal yang penulis lakukan adalah mencari informan yang pada saat perang kemerdekaan benar-benar ikut terlibat secara langsung dengan cara mencari data-data informan di kantor veteran pusat.

4. Interpretasi

Setelah dilakukan kritik, baik kritik intern maupun ekstern, terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan maka dapat dikatakan telah diperoleh data valid yang diperlukan. Data-data tersebut ditafsirkan dan dihubungkan-hubungkan sehingga menjadi suatu kesatuan cerita yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Historiografi

Adalah rekonstruksi yang imajinatif berdasarkan data yang merupakan fakta dari masa lampau dengan menempuh suatu proses (Gottchlak,1975:32).

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka penulisan laporan penelitian ini, penulis perlu memberikan sistematika penulis yang dituangkan dalam lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

BAB I. Pendahuluan, meliputi: latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran secara umum kabupaten Magelang menjelang Agresi Militer Belanda tahun 1947-1949 yang meliputi: letak geografis kabupaten, kondisi sosial ekonomi, serta kondisi politik kabupaten dan kota Magelang.

BAB III. Perjuangan rakyat Magelang mempertahankan kemerdekaan tahun 1945-1947, meliputi perjuangan rakyat Magelang mempertahankan kemerdekaan tahun 1945, terdiri dari sub bab Insiden di jalan Tidar, insiden Merah Putih di Hotel Nitaka, pelucutan senjata tentara Jepang, perjuangan menghadapi Sekutu di Magelang, perjuangan rakyat Magelang mempertahankan kemerdekaan tahun 1947, terdiri dari sub bab rencana pendudukan kembali Indonesia

oleh Belanda, Agresi Militer Belanda I tahun 1947. Partisipasi rakyat Magelang dalam Agresi Militer Belanda I tahun 1947.

BAB IV. Perjuangan rakyat Magelang mempertahankan kemerdekaan tahun 1948/1949, meliputi situasi Magelang menjelang Agresi Militer Belanda II tahun 1948/1949, Agresi Militer Belanda II tahun 1948/1949, partisipasi rakyat Magelang dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II tahun 1948/1949, terdiri dari sub bab pemboman 3 jembatan di Magelang, kota Magelang dibumi hanguskan dan strategi gerilya rakyat Magelang. Pembahasan terakhir adalah akhir pendudukan Belanda serta situasi Pemerintahan di Magelang pasca Agresi Militer Belanda II.

BAB V. Penutup yang terdiri dari simpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN SECARA UMUM KABUPATEN MAGELANG MENJELANG AGRESI MILITER BELANDA I TAHUN 1947

A. Letak Geografis Kabupaten dan Kota Magelang

Daerah Magelang merupakan salah satu daerah yang berada di Karesidenan Kedu. Karesidenan Kedu meliputi daerah kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo dan kabupaten Magelang. Kota Magelangs sebagai ibu kotanya. Secara administrative Magelang berdasarkan letaknya termasuk daerah yang berada di tengah-tengah pulau Jawa., dalam bahasa Jawa sering disebut “*pusernya Tanah jawa*”. Magelang salah satu dari 35 daerah tingkat dua yang ada di Jawa Tengah, yang letak wilayahnya dibagian selatan.

Berdasarkan letaknya daerah Magelang berada pada $11^{\circ} 01' 51''$ sampai $110^{\circ} 26' 28''$ BT dan $7^{\circ} 19' 13''$ sampai $7^{\circ} 42' 16''$ LS. Magelang sebagai suatu daerah Tingkat II di propinsi Jawa Tengah letaknya diapit oleh beberapa Dati II lainnya yang berada di karesidenan Kedu. Pada waktu itu ibu kota Magelang berada di kota Praja Magelang. Batas-batas wilayah Magelang sebagai berikut.

1. Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
 2. Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupetan Boyolali
 3. Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Jogjakarta
 4. Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- (Kabupaten Magelang dalam Angka, 1980:2).

Letak Magelang menjadi strategis karena menjadi jalur utama lalu lintas yang menghubungkan kota-kota besar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Adapun jalur lalu lintas yang dimaksud adalah jalur utara jurusan Semarang, ke selatan jurusan Jogjakarta dan Purworejo, ke barat jurusan Temanggung dan Wonosobo. Posisi Magelang yang strategis ini memudahkan Belanda untuk memasukinya. Belanda masuk melalui daerah Selatan, yaitu dari Jogjakarta melintasi jembatan Krasak menuju kecamatan Salam.

Daerah Magelang termasuk wilayah daratan. Berdasarkan letaknya mencapai ketinggian kurang lebih 360 m dari permukaan air laut. Bentang alam daerah Magelang terdiri atas pegunungan dan perbukitan yang mengelilingi wilayah Magelang. Di sebelah barat terdapat gunung Sumbing dengan ketinggian 3371 m sedangkan di sebelah timur terdapat gunung Merapi dengan ketinggian 2911m yang berbatasan dengan Boyolali dan gunung Merbabu ketinggiannya mencapai 3142 m berbatasan dengan Semarang. Bukit Menoreh berada di sebelah selatan berbatasan dengan daerah Istimewa Jogjakarta. Di sebelah utara terdapat gunung Telomoyo dan gunung Andong yang berada di daerah perbatasan dengan Kabupaten Semarang. Di tengah kota Magelang terdapat gunung Tidar yang oleh orang Jawa disebut sebagai pakunya Pulau Jawa (Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang Tahun 1946).

Pegunungan-pegunungan tersebut menyebabkan kondisi tanah di sebagian wilayah Magelang subur. Kesuburan itu juga karena iklim yang ada

sepanjang tahun sangat menguntungkan untuk pertanian, ditambah curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun.

Daerah Magelang yang kondisi tanahnya subur meliputi daerah-daerah yang berada di sebelah utara dan selatan, yaitu Pakis, Kaliangkrik, Kajoran, Grabag, Ngablak, Windusari, dan Sawangan. Kaliangkrik, Kajoran dan Windusari adalah daerah yang berada di lereng gunung Sumbing. Sawangan dan Pakis adalah daerah yang di lereng gunung Merbabu. Sedangkan Nagblak dan Grabag di lereng gunung Andong dan gunung Telomoyo.

Di bagian selatan terdapat daerah-daerah yang subur karena berada di lereng gunung Merapi yang aktif mengeluarkan lava. Adapun daerah-daerahnya meliputi Muntilan, Dukun, Srumbung, dan Salam yang berbatasan dengan daerah Istimewa Jogjakarta (Priadji, 1995).

Pentingnya kondisi geografis Magelang terhadap perjuangan Rakyat melawan Belanda dalam Agresi Militer Belanda I dan II tahun 1947 hingga tahun 1949 adalah dalam mengatur strategi perang yaitu dengan gerilya dan juga sebagai pusat perjuangan. Dengan kondisi geografis Magelang yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit maka akan mempermudah mengatur strategi pertahanan dan perlawanan rakyat terhadap Belanda. Mereka berjuang melakukan perlawanan dengan bergerilya dari satu daerah ke daerah yang lain.

B. Kondisi Sosial Ekonomi Menjelang Agresi Militer Belanda I Tahun 1947

Kehidupan masyarakat Magelang sejak pendudukan Jepang sangat sulit terutama di bidang perekonomian. Sebagian produk pangan rakyat dirampas Jepang untuk memenuhi kebutuhan logistik mereka dan untuk biaya perang melawan Sekutu. Jepang menjalankan system ekonomi perang, yaitu semua kegiatan ekonominya dicurahkan bagi kebutuhan perang demi tercapainya kemenangan akhir (Sumarmo, 1991: 40).

Magelang memiliki berbagai potensi ekonomi yang meliputi beberapa aspek. Pertama sebagai pusat dan hasil pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan serta tembakau. Kedua, sebagai pusat kegiatan administratif pemerintahan Kota Madya Magelang dan Kabupaten Magelang. Ketiga sebagai tempat yang dilalui kepadatan arus lalu lintas kendaraan bermotor dari Jogjakarta, Semarang, Banyumas dan Temanggung (Indriyani, 1992: 5). Ketiga aspek tersebut sangat menarik bagi Belanda. Menurutnya apabila dapat menduduki Magelang maka dengan mudah pasukannya bergerak menuju Jogjakarta.

Keadaan perekonomian yang sulit itu diperburuk dengan adanya blokade ekonomi Belanda terhadap Republik Indonesia. Blokade ekonomi ini adalah larangan masuk ke Indonesia berupa barang senjata maupun makanan baik melalui darat maupun laut. Kesulitan yang diderita penduduk Magelang adalah adanya peredaran Oeang Republik Indonesia (ORI) palsu yang dikeluarkan oleh Belanda (Priadji, 1995).

Penduduk Magelang apabila akan mencari kebutuhan sehari-hari, secara terpaksa harus membeli di daerah pendudukan Belanda, seperti Ambarawa, Semarang, dan Salatiga dengan harga yang sangat mahal, terlebih lagi mata uang ORI harus ditukar dahulu dengan mata uang Belanda yang nilainya lebih tinggi (Muryani, 1995: 27).

Magelang memiliki luas wilayah kurang lebih 106.694.665 ha, yang terdiri atas sawah, hutan, pekarangan dan lain-lain. Dalam penggunaannya luas lahan sawah 40.137 ha, sedangkan lahan kering 37.508 ha (Kabupaten Magelang dalam Angka. 1980: 14).

Jenis tanahnya adalah latosol dengan pola penggunaan sebagai berikut; tanah sawah seluas 577.459 h, pekarangan bangunan seluas 671.693 h, tegalan seluas 555.411h, hutan negara seluas 1,259 h, lain-lain seluas 569.178 h. suhu udara rata-rata untuk tingkat minimum $13^{\circ}\text{C} - 21^{\circ}\text{C}$ dan maksimal $28^{\circ}\text{C} - 31^{\circ}\text{C}$, dengan curah hujan rata-rata 2.056 mm pertahun:179 Sifat iklim tropis dengan hujan dan kemarau silih berganti setiap setengah tahun dan temperatur rata-rata antara $20^{\circ}\text{C} - 26^{\circ}\text{C}$. curah hujan rata-rata pertahun 1616 mm. Sumber alam yang menonjol adalah bahan tambang, diantaranya terdapat di:

1. Pasir di daerah selatan Mungkid, Muntilan, Dukuh, Srumbung, Ngluwar, Secang dan Sleman.
2. Batu tras terdapat di Dukuh, Srumbung, Salam, Pakis dan Kaliangkrik.
3. Mangan di Borobudur dan Salaman.
4. Marmer di Salaman.

5. Pasir besi dan pasir kwarsa di Candimulyo, Bandongan dan Ngeluwar.
6. Emas di Candimulyo dan Bandongan (Tuntje Tnunay,1996:193).

Perekonomian rakyat bertumpu pada usaha pertanian. Tamanam pertanian ini meliputi tembakau, jagung, padi, ubi, kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kopi, kelapa dll. Dari berbagai macam tanaman yang ada, tanaman padi menjadi tanaman utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Magelang (Ensiklopedi Indonesia 4, 1983: 282).

Dengan keadaan Magelang yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung berpengaruh juga terhadap pemenuhan kebutuhan hidup. Semakin sulit terutama untuk mendapat kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, sabun dll. Hal ini disebabkan karena membumbungnya harga di pusat.

C. Kondisi Politik Menjelang Agresi Militer Belanda I Tahun 1947

Kondisi politik dan pemerintah tahun 1942 diawali dengan kabar berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Kabar tersebut diterima dengan gembira oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan berakhirnya kekuasaan Belanda maka membuka harapan besar masyarakat Indonesia dan membuka harapan besar pula bagi rakyat untuk melanjutkan penghidupan yang lebih baik tanpa tekanan dan intimidasi dari pemerintahan Belanda, tetapi setelah berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda yang kemudian digantikan oleh pemerintah militer Jepang harapan besar masyarakat Indonesia tak terwujud bahkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat semakin

bertambah. Pemerintah militer Jepang lebih parah dibandingkan dengan pemerintah kolonial Belanda (Sumarmo, 1991: 20-21).

Di tahun 1945 situasi perang antara Jepang melawan Sekutu semakin membuat Jepang terdesak. Sekutu lewat deklarasi Potsdam tanggal 24 Juli 1945 menyerukan kepada Jepang untuk segera menyerah tanpa syarat. Tanggal 6 Agustus Amerika Serikat yang tidak sabar lagi menanti pernyataan Jepang sehingga membom kota Hiroshima dan tanggal 9 Agustus kota Nagasaki mendapat giliran mendapat bom atom. Disusul pengumuman perang Rusia kepada Jepang tanggal 8 Agustus dan langsung menyusuri menyerbu Korea dan terus masuk Jepang dengan merebut Sakhalin (Sumarmo. 1991: 72).

Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945 mempercepat penyerahan Jepang kepada Sekutu yang terjadi tanggal 15 Agustus 1945. Dengan demikian bangsa Indonesia berada di bawah kendali Sekutu, kemudian Inggris yang akan mengurus segala sesuatunya di Indonesia, namun kedatangan mereka terlambat. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan pemerintah di Indonesia. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaan. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno dan Moh Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Bunyi lengkap naskah proklamasi itu adalah sebagai berikut:

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, hari 17 boelan 8 tahun 05

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno/Hatta

Tanda tangan Soekarno

Tanda tanagn Hatta

Berita proklamasi yang telah meluas di seluruh Jakarta segera tersebar ke seluruh Indonesia. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan kepala Bagian Radio dari kantor Domei, Waidar B. Palenewen. Ia menerima teks itu dari seorang wartawan Domei, yang bernama Syahrudin. Segera ia memerintah F. Wuz seorang markonis supaya disiarkan tiga kali berturut-turut. Berita ini kemudian diulangi setiap setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti. Akibat dari penyiaran itu, pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita tersebut dan menyatakannya sebagai kekeliruan. Pada hari senin tanggal 20 Agustus 1945 pemancar itu disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk.

Sekalipun pemancar pada kantor Berita Domei disegel, mereka tidak kehilangan akal. Para pemuda membuat pemancar baru. Alat-alat pemancar yang diambil dari kantor berita Domei bagian demi bagian dibawa ke rumah Waidar B. Panelewen dan sebagian dibawa ke Menteng 31. Akhirnya terciptalah pemancar baru di Menteng 31, dengan kode panggilan DJK I. Dari situlah berita proklamasi disiarkan. Usaha para pemuda dalam penyiaran berita ini tidak terbatas lewat radio, melainkan juga lewat pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus membuat berita proklamasi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Demikian berita proklamasi kemerdekaan tersiar ke seluruh pelosok tanah air (Poesponegoro, 1993: 95).

Adanya berita proklamasi kemerdekaan itu telah menggembirakan masyarakat bawah., mereka memberi sambutan dengan hangat dan bahagia termasuk masyarakat Magelang. Dari Jakarta berita tersebut dengan cepat sampai di Magelang. Berita proklamasi kemerdekaan itu sampai di Magelang tanggal 17 Agustus 1945, tetapi tersebar luas baru tanggal 18 Agustus 1945 (Karyo Mudji, wawancara tanggal 18 Agustus 2005).

Setelah mendengar berita proklamasi kemerdekaan, sikap rakyat Magelang menjadi beringas, terutama para pemudanya. Nampak kalau mereka sudah lama menaruh dendam kepada para penjajah Belanda maupun Jepang, dan saat ini akan mendapat kesempatan untuk membalas dendam. Pada tanggal 3 September 1945 jam 21.00 WIB sejumlah rakyat mengadakan pawai obor menghadap residen RP. Soeroso dan menuntut agar segera diumumkan

secara resmi tentang telah diproklamirkannya Indonesia Merdeka di Jakarta oleh Soekarno-Hatta, dan bahwa rakyat Kedu menjadi milik Indonesia yang merdeka. Residen memenuhi permintaan rakyat itu dengan tetap penuh hati-hati serta meminta agar rakyat tetap terkendali (Adiwiratmoko, 1998: 6).

Masyarakat mengibarkan bendera Merah Putih dimana-mana sebagai tanda bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka dan Magelang bebas dari penjajahan. Di daerah Magelang antara kaum tua dan muda berkumpul membicarakan kelangsungan hidup mesyarakat Magelang. Selain itu mulai mengadakan pengambilalihan instansi-instansi yang diduduki oleh Jepang, antara lain markas Kenpeitai, pemancar radio milik Kompetai, dan kantor-kantor jawatan pemerintah.

Dalam proses pengambilalihan kekuasaan kantor-kantor dan jawatan ini ternyata dari pihak Jepang tidak mengadakan perlawanan sehingga dapat berjalan lancar. Proses perebutan kekuasaan pemerintahan sipil ini waktunya memang sudah diperhitungkan oleh para pemimpin, sebab pada tanggal 16 September rombongan tentara pendudukan Sekutu pertama yang diboncengi NICA itu telah mulai mendarat di Tanjung Priok. Oleh karena itu perebutan memang harus segera dilakukan agar tidak didahului NICA.

BAB III

PERJUANGAN RAKYAT MAGELANG DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN TAHUN 1947

A. Perjuangan rakyat Magelang mempertahankan kemerdekaan tahun 1945.

Pada babak terakhir perang antar Jepang melawan negara-negara imperialis Barat seperti Perancis, Inggris, Belanda dan Amerika Serikat, Jepang menderita kekalahan. Ia menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Oleh karena ketika penyerahan itu pasukan Sekutu belum mendarat di Indonesia, maka kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh rakyat Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaan tanpa menunggu janji kemerdekaan dari pihak Jepang. Dengan langkah demikian maka berdirilah Negara Republik Indonesia yang merdeka tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 (Sumarmo, 1991: 85).

Di Magelang berita kemerdekaan ini belum terdengar secara luas. Oleh karena itu keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945, R.P Soeroso langsung berangkat ke Jakarta untuk membuktikan peristiwa penting itu dan untuk mengetahui lebih lanjut kondisi politik nasional. Saat itu Bupati Kabupaten Magelang, R.A.A. Sosrodiprodjo sebagai Kentyo baru mengetahuinya setelah pada tanggal 21 Agustus 1945 Syutyokan (Residen Kedu) R.P. Soeroso tiba di Magelang dari Jakarta. Tepatnya tanggal 3 September 1945 pukul 21. 00 WIB rakyat Magelang telah berkumpul untuk mendengar secara resmi pengumuman telah diproklamirkannya Indonesia merdeka di Jakarta oleh Ir. Soekarno-Hatta dan bahwa karesidenan Kedu

menjadi bagian dari negara Indonesia yang telah merdeka (Pemda Kab. Magelang, 1974: 62).

R.P. Soeroso sebagai pejabat pemerintah sipil yang berkedudukan di Magelang diangkat menjadi Gubernur Jawa Tengah. Ia terus mengadakan konsultasi dan konsolidasi guna mencari jalan mengambil alih kekuasaan sipil dari tangan Jepang. Atas usul tokoh-tokoh Barisan Pelopor agar diandakan pertemuan dengan kepala-kepala kantor dan Jawatan pemerintah Bangsa Indonesia, maka pada tanggal 10 September 1945 dilaksanakan pertemuan di rumah Dr. Mardjaban di jalan Sultan Agung No. 09 (Adiwiratmoko, 1998: 6).

Petemuan ini dihadiri oleh kepala kantor dan Jawatan pemerintah bangsa Indonesia, unsur KNI dan beberapa tokoh pemuda. Keputusan yang diambil antara lain:

1. Bahwa semua pegawai pemerintah berjanji untuk setia kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan tidak akan mau diperintah oleh pembesar-pembesar Jawatan yang terdiri dari orang-orang Jepang.
2. Membentuk beberapa sayap pemuda untuk dapat diajak bersama-sama mengatasi segala persoalan.
3. Bahwa dalam waktu singkat para pemuda pejuang ini hendak melaksanakan pengambilalihan kekuasaan di kantor-kantor dan Jawatan pemerintah untuk mencegah agar alat kekuasaan itu tidak diserahkan oleh Jepang kepada Sekutu.

Magelang sebagai markas tentara Jepang tidak lepas dari aksi pengambilalihan kekuasaan. Masyarakat Magelang melakukan aksi-aksi itu

secara paksa. Markas tentara yang berada di jalan Kartini dan markas polisi militer Jepang berada di jalan Tidar masih lengkap persenjataannya. Para pemuda yang menjadi anggota badan-badan perjuangan merencanakan untuk merebut senjata dari tangan Jepang . Mula-mula pelucutan senjata balatentara Jepang dan polisi bentukannya dilakukan tanpa koordinasi dan secara perseorangan (Dinas Sejarah Militer Kodam VIII/ Diponegoro, 1977: 213).

Aktivitas masyarakat ini kemudian meningkat menjadi tindakan yang teratur, mulai menduduki gedung-gedung yang dihuni Jepang dan mengambil alih segala perlengkapannya. Pada tanggal 23 September 1945 para pemuda dengan dipimpin oleh tokoh-tokoh Barisan Pelopor mengadakan aksi pengambilalihan kekuasaan pemerintah sipil dengan menduduki kantor-kantor dan jawatan-jawatan pemerintah. Kemudian para wakil-wakil kepala kantor dan jawatan yang dijabat oleh orang Indonesia menduduki jabatan kepala yang pada waktu itu masih diduduki oleh orang-orang Jepang, aksi berikutnya pada dinding gedung kantor dan perusahaan-perusahaan diberi tulisan “MILIK RI” (Yatimin, wawancara tanggal 18 Agustus 2005).

Pada malam harinya kelompok pemuda mengadakan rapat di markas Pemuda Indonesia Maluku (PIM) di jalan Poncol (sekarang jalan A. Yani, di depan gedung Guesthouse Zipur). Salah satu keputusan yang diambil ialah bahwa pada malam hari itu juga para pemuda akan mengadakan penempelan Plakat Bendera Merah Putih di seluruh kota. Maka pada pagi harinya seluruh kota dimulai dari kelurahan Kramat yang paling utara hingga

kelurahan Tidar yang paling selatan telah tertempel plakat Bendera Merah Putih (Adiwiratmoko, 1998: 7-9).

1. Insiden Merah Putih di Hotel Nitaka

Pagi hari tanggal 24 September pukul 11. 00 WIB seorang pemuda yang sedang melintas di depan hotel Nitaka melihat seorang prajurit sedang menyobek plakat Bendera Merah Putih yang ditempel di dinding depan hotel itu. Melihat hal itu ribuan pemuda dari pelosok Magelang dengan bersenjata bambu runcing dan lainnya berkumpul di depan hotel dan berteriak-teriak menuntut prajurit yang telah menghina bendera nasional itu dihukum (Pemda Kab. Magelang, 1974: 63). Saat itu pihak Jepang mengajak beberapa pemuda untuk berunding, tetapi gagal dan kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan perundingan di markas Kompeitai (Polisi Militer Jepang) di jalan Tidar. Markas Kompeitai perundingan berlangsung antara Pak Tarib (pemimpin Pejuang) dengan komandan Kompetiai kolonel Mamuru. Namun perundingan inipun gagal karena pihak polisi merasa sudah tidak mempunyai wewenang untuk menghukum serdadu Nippon. Menurutnya Mayor Jendreal Nakamuralah yang berhak menangani masalah ini. Oleh karena itu massa bergerak ke markas Nakamura Butai di jalan Kartini. Sekitar pukul 17. 00 WIB perundingan selesai dengan keputusan yang tetap tidak memuaskan masyarakat Magelang terutama para pemuda (Pemda Kab. Magelang. 1974: 13).

Pada malamnya para tokoh pejuang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan upacara bendera merah putih pada esok harinya, antara lain menjahit Bendera Merah putih yang berasal dari bendera Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) oleh nyonyah Raden Kolbiun di rumahnya di kampong Meteseh, dan juga menyiapkan tiang bendera yang berupa tiang telfon milik kantor telfon Magelang (Adiwiratmoko, 1998: 15).

2. Insiden di Jalan Tidar

R.P. Soeroso menghimbau agar semangat rakyat Magelang tidak surut dan meminta esok harinya bersama-sama melakukan upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di gunung Tidar sebagai tanda kebulatan tekad rakyat Magelang untuk menegakkan kemerdekaan negaranya. Pagi-pagi sekali tanggal 25 September 1945 ketika udara masih gelap, kabut tebal, jalan-jalan masih sepi, ratusan rakyat, pemuda dan pelajar nampak berbondong-bondong mendaki gunung Tidar dari berbagai penjuru. Tujuan mereka adalah untuk mengikuti upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di Puncak Gunung Tidar. Pukul 06.00 WIB pengerekan bendera dimulai sambil diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saat peserta upacara turun dari gunung Tidar tiba-tiba terjadi penembakan oleh serdadu Jepang yang bermarkas di gedung HCS jalan Tidar dan menewaskan 4 korban dari rakyat. Mereka adalah Kusni, Slamet, Samad Sastrodimejo dan Djajus (Pemda Kab. Magelang, 1974: 63).

3. Pelucutan Senjata Tentara Jepang

Situasi dan kondisi daerah Magelang makin gawat dengan terjadinya insiden-insiden antara rakyat Magelang dan bala tentara Nippon. Proses peralihan kekuasaan dari pemerintah pendudukan Jepang ke pemerintah RI diiringi berbagai konflik dari sisa-sisa tentaranya yang masih berkeliaran di Magelang. Hal ini disebabkan pasukan Jepang berubah fungsi sebagai alat Sekutu yang berkewajiban menjaga status quo menjelang pendaratan tentara Inggris di Indonesia.

Peristiwa pelucutan senjata Jepang di luar Magelang, yaitu di Semarang, Jogjakarta dan daerah lain mendorong keberanian rakyat Magelang untuk melakukan hal yang sama. Masyarakat mendesak kepada pemimpin-pemimpin perjuangan untuk secepatnya melucuti senjata prajurit Jepang. Pada tanggal 12 Oktober 1945 diadakan perundingan antara pemimpin pemerintah, pihak militer, pihak badan-badan perjuangan di rumah R.P. Soeroso (Residen Kedu merangkap Gubernur Jawa Tengah).

Rapat dihadiri para pejuang bangsa ini menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Pihak Jepang harus menyerahkan senjata pada pihak RI dengan sukarela maupun kekerasan.
2. Perlu dibentuk delegasi di pihak Indonesia untuk berunding dengan Mayor Jenderal Nakasimura (Adiwiratmoko, 1998: 24).

Masyarakat Magelang melucuti senjata secara damai dimulai pada tanggal 13 Oktober 1945, mereka mengirim delegasi perundingan ke Markas Nakamura Butai di jalan Kartini. Delegasi ini terdiri dari 3 orang wakil rakyat yaitu Mayor Maryadi selaku kepala staf Residen BKR, IP I Legowo selaku pejabat kepolisian kota Magelang dan Tartib Prawiradihardjo selaku anggota KNI. Mereka berunding dengan Mayor Jenderal Nakamura guna mencari penyelesaian masalah pemerintah militer Jepang yaitu dengan penyerahan senjata kepada bangsa Indonesia. Sementara di luar gendung pasukan rakyat yang terdiri dari BKR, Polisi, dan berbagai laskar perjuangan telah mengepung markas.

Perundingan ternyata tidak mencapai kesepakatan, akhirnya tanggal 14 oktober 1945 serangan dimulai. Penyerangan pertama ditujukan pada penjagaan tentara Jepang. Rakyat Magelang berhasil melucuti senjata dan mereka dikumpulkan di luar penjagaan. Sasaran kedua adalah memaksa Nakamura meyerahkan senjata yang berada di gedung dan alat-alat perang lainnya kepada pejuang. Para pejuang akhirnya berhasil merebut senjata pasukan Jepang dan menawanya, kemudian mereka diangkut ke Purworejo, Kebumen dan Gombong untuk diserahkan kepada RAPWI (*Recovery Allied Prisoners and War Internees*) (Wahyuningsih, 2001: 61).

4. Perjuangan menghadapi Sekutu di Magelang

Pada tanggal 19 Oktober 1945 pasukan Inggris mendarat di Semarang menuju Ambarawa dan tiba di Magelang tanggal 26 Agustus 1945. Sebenarnya dari Ambarawa pasukan Sekutu itu akan menuju Jogjakarta. Maksud kedatangan mereka ke wilayah Kedu adalah untuk melucuti dan membebaskan tawanan Belanda. Namun kenyataannya mereka mempersenjatai Serdadu Belanda dan memberikan wewenang daerah Kedu atas nama NICA. Ketika mereka datang pertama ke Ambarawa mereka masih gabungan antara tentara Gurkha, Cungkung dan Jepang, tetapi kembali ke Semarang mereka menjadi tentara NICA (Muh Sakeh, wawancara tanggal 22 Agustus 2005).

Pada hari rabu tanggal 31 Oktober 1945 sekitar jam 10.00 bantuan Jepang dari Semarang yang telah dipersenjatai dan dibekali perasaan dendam oleh Inggris, sebanyak 7 truk tiba di Magelang dengan kawalan pesawat terbang dari udara. Segera terdengar berita bahwa pertahanan di sektor utara telah bobol. Pertahanan di Keramat telah dilalui, mereka terus menuju kota dan menembak siapa saja yang mereka temui. Pertahanan di daerah Potrobangsari dan Badaan bobol. Kapten Yahya dari Purworejo gugur di tempat itu. Pertempuran baru berhenti setelah dilepas beberapa orang tawanan Jepang di Magelang yang ditugaskan untuk memberitahukan bahwa semua temannya di tawanan masih selamat.

Sementara itu di sektor selatan pertempuran masih berlangsung. Oleh karena itu dari pihak Inggris di Semarang mendesak

kepada presiden Soekarno di Jakarta untuk segera mengeluarkan perintah gendat senjata. Pada tanggal 1 November beliau pergi ke Semarang kemudian ke Jogjakarta. Di Jogjakarta presiden mengadakan pertemuan dengan kepala staf Umum Mayor Jenderal Urip Sumoharjo, Markas Besar daerah Magelang, Sarbini dan beberapa tokoh lain dari Magelang. Pertemuan diselenggarakan di hotel Merdeka yang dihadiri pula oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VII. Pertemuan dimulai pada jam 16.00 tanggal 1 November 1945 dan membahas tentang pertempuran yang sedang berlangsung di Magelang. Pertemuan menghasilkan kata sepakat untuk menghentikan pertempuran.

Pada tanggal 2 November 1945 jam 06.00 pagi, secara resmi pertempuran itu berhenti, namun di sana-sini masih terdengar suara tembakan dari kedua belah pihak. Pada hari itu juga perundingan dilanjutkan kembali dan bertempat di markas Sekutu, Badaan. Pertempuran sudah berhenti tetapi kedua belah pihak tidak tinggal diam. Ternyata Inggris mendatangkan pasukan Gurkha dan NICA-nya sebanyak 157 truk dan ditambah 13 pucuk meriam dari Ambarawa. Sebagai persediaan makanan mereka membeli habis bahan-bahan pangan yang ada di pasar-pasar Magelang. Melihat kenyataan itu pihak kita mengadakan blockade ke dalam kota. Sementara itu bantuan pasukan dari daerah-daerah lain mulai berdatangan kembali dan segera mengambil posisi mengepung kedudukan tentara Sekutu (Adiwiratmoko, 1998: 40-46).

Ternyata pada tanggal 20 sore menjelang 21 November 1945, pasukan Sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang dan mengundurkan diri ke Ambarawa. Melihat mundurnya pasukan musuh, dibawah pimpinan pak Sarbini, pak Soerjosoempeno dan pak Ahmad Yani, pasukan kita mengadakan pengejaran. Sampai Pringsurat musuh mendapat perlawanan, dan di Ngipik musuh dicegat oleh pemuda-pemuda dari Grabag. Sampai di Ngipik musuh membakari rumah-rumah penduduk yang berada di tepi jalan raya. Pasukan kita terus mengejar dan dibantu oleh rakyat setempat. Akhirnya musuh mundur sampai ke Ambarawa (Soedjod Mangkudiharjo, wawancara tanggal 22 Agustus 2005).

B. Perjuangan rakyat Magelang mempertahankan kemerdekaan tahun 1947.

1. Rencana pendudukan kembali Indonesia oleh Belanda

Pihak Belanda sudah sejak bulan April 1944 mempersiapkan pendudukan kembali Indonesia. Sejak bulan itu Belanda dan Inggris telah menyelenggarakan perundingan-perundingan di London dan Kandy. Perundingan itu menghasilkan apa yang dinamakan sebagai "*Civil Affair Agreement*". Adapun isinya adalah pengaturan penyerahan kembali dari pihak Inggris kepada pihak Belanda khususnya yang meyangkut Sumatera (daerah Indonesia dibawah SEAC, *South East Asia Command*). Menurut ketentuan tersebut pada fase pertama panglima Tentara Sekutu akan berwenang menyelenggarakan operasi militer serta memulihkan keamanan dan ketertiban. Pada fase kedua, setelah keadaan kembali normal, pejabat-

pejabat NICA (*Netherlands Indies Civil administration*) akan mengambil alih tanggungjawab tersebut dari pihak Inggris yang mewakili Sekutu. Sesuai dengan persetujuan Potsdam maka ketentuan diperluas, Inggris tidak hanya bertanggungjawab atas pendudukan kembali Sumatera, tetapi seluruh Indoneisa (Moedjianto. 1988: 96).

Dalam kesepakatan ini Inggris berjanji akan secepatnya meyerahkan tanggungjawab pemerintahan sipil pada pihak Belanda dan pembentukan alat-alat administrasi serta kehakiman Hindia Belanda. Dengan demikian berarti Belanda akan kembali menguasai Indonesia seperti sebelum pendudukan Jepang.

Pada tanggal 6 September 1945, Bord Luis Mounbatten selaku Panglima SEAC tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Tentara Jepang diminat untuk membubarkan rakyat Indonesia dan menangkap pimpinan-pimpinan Indonesia dan diserahkan kepada Sekutu, hal itu berarti angin segar bagi NICA yang dipimpin oleh Dr. HJ van Mook (Nasution, 1978: 5).

Jadi Inggris datang ke Indonesia untuk menjalankan amanat Potsdam. Tentara Inggris yang ditugaskan ke Indonesia itu dikenal sebagai AFNEI (*Allied forces For Netherlands Indies*) dan terdiri dari kesatuan-kesatuan tentara Inggris yang berkebangsaan India (biasa disebut tentara Gurkha).

Secara terperinci tugas SEAC yang dibebankan selanjutnya pada AFNEI adalah:

1. Menerima penyerahan tentara Jepang tanpa syarat, melucuti dan mengembalikannya ke tanah air.
2. Membebaskan APWI (*Allied Prisoners and War Internees*), tugas ini disebut RAPWI (*Recovery Allied Prisoners and War Internees*).
3. Menjaga kemandirian dan ketertiban sehingga memungkinkan pemerintah sipil berfungsi kembali.
4. Mencari keterangan dan mengadili para pejabat perang (Moedjiyanto, 1988: 97).

Awal bulan November 1945, suasana Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia semakin genting. Ini disebabkan karena ketika Sekutu datang ke Indonesia Belanda juga ikut serta dengan nama NICA yang bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan di Indonesia. Belanda melakukan teror kepada para pemimpin Indonesia terutama Soekarno-Hatta. Situasi semakin genting lagi setelah pada tanggal 30 Desember 1945 Belanda mendaratkan pasukan marinirnya di Tanjung Priok. Dengan demikian para pemimpin merasa tidak akan dapat melaksanakan tugasnya untuk mengatur jalannya pemerintahan dengan tenang. Hal ini menyebabkan mereka berfikir untuk memindahkan ibu kota ke tempat yang lebih aman. Jogjakarta dianggap lebih tepat untuk menjadi ibu kota pusat pemerintahan Negara pada waktu itu. Pemindahan ibu kota Negara atau pusat pemerintahan terjadi pada tanggal 4 Januari 1947.

Menjadikan kota Jogjakarta sebagai ibu kota ketika itu merupakan pilihan yang tepat karena semangat kemerdekaan yang tinggi dari penduduk dan ditunjang oleh sikap tegas Sri Sultan merupakan modal yang sangat besar. Ketika para pemimpin pindah ke Jogjakarta, Sutan Syahrir masih tetap menetap di Jakarta. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kemungkinan dilakukannya kontak dengan pihak Belanda. Bangsa Indonesia berusaha berunding, namun dilain pihak harus siap untuk berperang (Masjkuri, 1976: 287-288).

Akhirnya dibawah pimpinan Lord Killearn sejak tanggal 7 Oktober 1946 diadakan perundingan antara utusan Indonesia yang diketuai oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir dan utusan Belanda yang diketuai oleh prof. Schermerhorn serta pihak Inggris. Pada tanggal 14 Oktober 1946, perundingan yang diadakan di Jakarta menghasilkan “genjatan senjata” (Kansil, 1968: 48).

Perundingan-perundingan selanjutnya diadakan di Linggajati dan Jakarta. Diplomasi ini bertujuan utnk memperoleh pengakuan kedaulatan internasional. Dalam rangka itulah pada tahun ini pula tercapai perjanjian antara dua belah pihak yang kemudian dikenal dengan perjanjian Linggajati. Perjanjian ini tercapai pada tanggal 15 November 1946 yang naskahnya baru ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Gambir Jakarta (Dinas Sejarah Militer Kodam VII/ Dipogoro, 1977: 265). Persetujuan Linggajati ini membuahkan 17 pasal, yang diantaranya adalah:

1. Pengakuan Belanda terhadap kekuasaan bangsa Indonesia di pulau-pulau Jawa, Madura dan Sumatera yang sebagian besar berdasarkan kenyataan bahwa pasukan-pasukan Republik Indonesia mudah menduduki daerah dengan baik.
2. Kerjasama antara kedua pemerintah dalam usaha memberikan suatu Negara Serikat dan bahwa NIS ini akan terdiri atas tiga Negara bagian, yaitu Jawa, Madura dan Sumatra, Kalimantan dan Indonesia bagian timur.
3. NIS dan kerajaan Belanda bekerja sama menuju pembentukan persatuan politik atas dasar kedudukan yang sama tinggi, yaitu Uni Indonesia-Belanda yang akan diakui pada tanggal 1 Januari 1949 (Masjkuri, 1976: 291).

2. Agresi Militer Belanda I tahun 1947

Situasi politik semakin genting karena adanya persetujuan Linggajati. Partai politik yang ada dalam tubuh KNIP saling bertentangan, dikarenakan reaksi pro dan kontra terhadap persetujuan ini. Sementara Belanda mulai melancarkan serangan adu domba untuk melemahkan pertahanan Angkatan Perang RI. Pertentangan Belanda dan Indonesia makin keras. Pada tanggal 30 November 1946 pasukan Inggris yang mewakili Sekutu ditarik seluruhnya dari Indonesia, selanjutnya yang akan dihadapi bangsa Indonesia adalah serdadu kolonial Belanda.

Dalam pelaksanaan persetujuan Linggajati ini menemui banyak kesukaran. Belanda berpendapat bahwa sebelum Negara Indonesia Serikat dibentuk hanya Belandalah yang berdaulat di seluruh Indonesia, sedang pemerintah Republik Indonesia sebaliknya berpendapat bahwa sebelum Negara Indonesia Serikat dibentuk, kedudukan de facto Republik Indonesia tidak berubah (Kansil, 1968: 49).

Terhadap perjanjian itu, Belanda merasa tidak puas dan menganggap RI tidak bersedia mentaati perjanjian Linggajati. Pihak Belanda mengeluh karena pihak RI terus saja meyelenggarakan hubungan dengan luar negeri, seperti ke India dan Negara-negara Timur Tengah, begitu juga tentang pelaksanaan pemulihan hak milik orang asing yang menurut Belanda harus segera dilakukan. Pihak RI juga mengeluh bahwa Belanda terus menjalankan aksi-aksi separatismenya, dan paling menyolok ialah bantuan Belanda kepada Partai Rakyat Pasundan yang mempelopori pendirian Negara Pasundan pada 4 Mei 1947 di wilayah RI yang diakui oleh Belanda dalam perjanjian Linggajati. Selain itu pihak Belanda terus saja memperkuat tentaranya padahal seharusnya dikurangi dan ditarik dari daerah RI. Pada bulan Maret Belanda telah menduduki Mojokerto dengan alasan untuk memperbaiki tanggul sungai Brantas. Oleh karena itu ternyata pada tanggal 20 Juli malam hari Belanda menyatakan tidak terikat lagi dan bebas bertindak (Moedjanto, 1988: 189).

Den Haag akhirnya meguasakan untuk meyerbu republik kepada Letnan Gubernur Jenderal van Mook. Agresi Kolonial Belanda ini oleh van

Mook diputuskan pada tanggal 19 Juli 1947. Lewat tengah malam tanggal 20 Juli 1947, dalam suatu pidato radio, Perdana menteri Beel menerangkan bahwa malam itu pemerintah Belanda memberikan kekuasaan kepada Letnan Gubernur Jenderal van Mook untuk menggunakan tentara Belanda guna melaksanakan suatu aksi polisionil (Nasution, 1978: 99).

Masuknya tentara Sekutu (Inggris) ke Indonesia ikut serta menyelundupkan pejabat-pejabat NICA dan tentara Belanda, diantaranya ada yang dipulas warna kulitnya sehingga menyerupai warna kulit serdadu Gurkha. Pemulasan warna kulit ini diketahui antara lain dari bangkai mereka yang terlempar di sungai Brantas ketika berkobar pertemuran Surabaya pada bulan November 1945 (Moedjanto, 1997:99).

Pada bulan Mei 1947 pemerintah mengeluarkan keputusan tentang peleburan semua badan perjuangan kedalam TNI, badan-badan perjuangan rakyat dan laskar-laskar mulai mengadakan persiapan-persiapan sebagai reaksi terhadap keputusan pemerintah itu. Rakyat Magelang yang semula bergabung dalam badan-badan atau laskar-laskar, sebagian masuk ke dalam TNI dan sebagian lagi menjadi rakyat biasa tetapi masih ikut berjuang bersama TNI (Karyo Mudji, wawancara tanggal 18 Agustus 2005).

Sejak tanggal 28 Mei 1947 utusan van Mook yakni Lolenburg dan Van Hoogstraten tiba di Jogjakarta untuk mengukur suasana Republik. Resminya mereka hendak mengadakan kantor penghubung di Jogjakarta akan tetapi ternyata mereka mengunjungi para pemimpin kita untuk

menyelami hati mereka. Lolenburg mengatakan bahwa kesulitan Linggarjati adalah karena pemerintah Republik Indonesia tak dapat menguasai TRI. Sebaliknya Belanda dapat mengekang tentaranya. Sementara pada bulan itu pula tersirat kabar dari Jakarta bahwa ada kemungkinan Belanda akan menyerbu secara besar-besaran. Hal itu terlihat dari gerak-gerik pasukan Belanda dan persiapan peralatan-peralatannya (Nasution, 1978: 12-14).

Masa genjatan senjata selain dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mengorganisir Angkatan Perang yaitu semua badan perjuangan yang bersenjata dan TRI dilebur menjadi TNI, situasi itu juga dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk memperkuat pasukannya. Setelah merasa cukup kuat mereka menganggap persetujuan Linggajati tidak ada gunanya.

Pada malam hari menjelang tanggal 21 Juli 1947 Belanda mulai menyerang Republik Indonesia dari segala jurusan dengan mengerahkan Angkatan Darat, Laut dan Udaranya. Belanda berdalih bahwa serangan itu hanyalah sekedar ‘tindakan kepolisian’ belaka. Namun serangan itu dilancarkan oleh seluruh angkatan perang Belanda (Kansil, 11968: 49).

Tujuan serangan pertama Belanda itu adalah dengan gerak cepat menduduki sejumlah kota di pedalaman seperti kota kabupaten, tempat-tempat persimpangan jalan raya dan pusat-pusat pertempuran. Tempat-tempat tersebut secara politik maupun ekonomi mempunyai arti yang

penting. Pada fase pertama ini Belanda merasa harus mencapai sasaran antara lain:

1. Politik : pengepungan ibu kota republik Indonesia dan penghapusan RI dari peta (menghilangkan de facto RI).
2. Ekonomi : perebutan daerah-daerah penghasil bahan makanan (daerah beras di Jawa Barat dan Jawa Timur) dan bahan ekspor (perkebunan di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera serta pertambangan di Sumatera).
3. Militer : penghancuran TNI.

Saat itu ibu kota RI memang terkepung dan hubungan ke luar sulit karena pelabuhan-pelabuhan yang berarti dikuasai Belanda. Ekonomi RI mengalami kesulitan pula karena daerah RI yang merupakan penghasil beras jatuh ke tangan Belanda, sedangkan hubungan dengan luar sulit karena blokade Belanda (Moedjanto, 1988: 15).

Di Jogjakarta, pada pukul 07.00 WIB, 4 buah pesawat pemburu Belanda terbang rendah mengelilingi kota Jogjakarta kemudian terbang menuju arah Semarang. Tengah harinya datang lagi 4 buah pesawat pembom Belanda dan melakukan pemboman atas lapangan terbang Maguwo. Serangan dilancarkan selama 15 menit, dari pukul 15.35 WIB sampai 15.50 WIB. Akibatnya terjadi beberapa kerusakan pada lapangan terbang tersebut dan melukai 4 orang penduduk, 2 diantaranya wanita (Nasution, 1978: 101).

Belanda mengerahkan brigade-brigadenya untuk menghadapi angkatan perang RI. Di Sumatera Belanda mengerahkan brigade "Z", di

Sumatra Tengah mereka menyerbu dengan brigade “U”, di Sumatra Selatan dengan brigade “Y”, di Jawa Barat dengan devisi “B” dan devisi “7” Desember, di Jawa Tengah dengan brigade “T”, di Jawa Timur dengan devisi “A” (Dinas Sejarah Militer VII/Diponegoro, 1977: 273).

Brigade “T” yang menyerang Jawa Tengah berhadapan dengan pasukan TNI. Mereka menggunakan senjata modern sedang tentara Indonesia yang masih menggunakan senjata tradisional dan senjata api hasil rampasan perang dari Jepang dan Belanda sebelumnya (Ruslan, wawancara tanggal 14 Agustus 2005).

3. Partisipasi rakyat Magelang dalam Perang Kemerdekaan I tahun 1947.

Keberadaan Sekutu sejak tanggal 26 Oktober 1945 di Magelang telah membuat warga khawatir akan dijajah lagi. Akhirnya masyarakat mengadakan perlawanan terhadap Sekutu yang dimulai sejak tanggal 31 Oktober 1945 sampai tanggal 21 November 1945. Perlawanan rakyat makin lama makin besar membuat Belanda terdesak dan bergerak mundur ke Ambarawa. Para pejuang, rakyat dan tentara Indonesia mengajar sampai daerah Bedono, Ngrancah, Grabag dan lain-lain. Di Ambarawa Belanda masih mendapatkan perlawanan gigih sehingga mundur ke Semarang.

Tentara pendudukan Sekutu telah melarikan diri dari kota Magelang setelah mendapat perlawanan dari BKR/TKR, pemuda dan rakyat Magelang dengan dibantu oleh BKR/TKR serta para pejuang dari daerah-daerah lain. Namun tidak berarti bahwa perjuangan telah selesai.

Tentara Sekutu yang diwakili oleh Inggris yang akan menyerahkan Indonesia ketangan Belanda untuk dijajah kembali, masih bertahan di Ambarawa. Resimen TKR Kedu dibawah pimpinan Letnan Kolonel M. Sarbini bersama dengan Badan-badan kelaskaran Magelang ikut menyerbu ke Ambarawa. Selain dari Kedu, juga TKR dan badan kelaskaran dari Jogjakarta, Surakarta, Purwokerto yang dipimpin langsung oleh Kolonel Soedorman sebagai Panglima Divisi Banyumas setelah gugurnya Letnan Kolonel Isdian. Di Ambarawa ini Sekutu memeralat tawanan-tawanan Jepang untuk ikut memerangi pasukan tentara Indonesia (Adiwiratmoko, 1998: 71). Setelah diserang oleh tentara Indonesia beserta badan-badan kelaskaran Magelang dan daerah lain selama 4 hari secara terus menerus sejak tanggal 12 Desember, akhirnya pada tanggal 16 Desember 1945 Sekutu mengundurkan diri ke Semarang (Muh Sakeh, wawancara tanggal 22 Agustus 2005).

Situasi nasional semakin genting karena Belanda masih berusaha menjajah Indonesia. Melihat kondisi yang demikian pemerintah sipil, militer, badan-badan perjuangan di Magelang, mengadakan konsultasi dan konsolidasi serta pembenahan-pembenahan ke dalam. Badan Oesaha Makanan (BOM) masih terus menyelenggarakan dapur umum untuk menjamin makanan para pejuang. Pasukan TKR dan badan-badan perjuangan membuat garis pertahanan di Mrangen, Srandol, Gunung Pati dan sebagainya. Beberapa badan perjuangan lain dikirim ke front Banyumanik, Ungaran, Genuk dan sekitarnya. Front tersebut terus dijaga

bergantian oleh para pejuang Indonesia yang terdiri atas pasukan dari Magelang, Surakarta, Salatiga, Pati dan lain-lain. Sementara Sekutu tetap tinggal di Semarang (Muh Zuhdi, wawancara tanggal 14 Agustus 2005).

Badan-badan perjuangan yang bermarkas di Magelang yang terus secara bergantian pada front tersebut adalah TKR bermarkas di tangsi Tuguran, Badaan; ALRI bermarkas di RSJ Kramat; TGP (tentara Geni Pelajar) bermarkas di ST Negeri Tuguran, Pemuda Indonesia Maluku (GPM) bermarkas di jalan A. Yani; TP (Tentara Pelajar) bermarkas di gedung MOSVIA jalan alun-alun selatan dan di gedung SMP Negeri I jalan pahlawan; KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) bermarkas di jalan Bayeman No. 5 (sekarang jalan Tentara Pelajar); MOBRJG (Mobile Brigade Polisi) bermarkas di jl. Diponegoro; kepolisian bermarkas di Gejuron; Hisbullah bermarkas di jalan Kejuron No. 27, Laskar rakyat bermarkas di gedung Bunder Jaranan, BPRI (Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia) bermarkas di Pakelan (Adiwiratmoko, 1998: 73).

Tanggal 21 Juli 1947, pukul 07. 55 WIB sebuah bomber Belanda terbang di atas Magelang dan menyebarkan pamflet yang sama isinya dengan pamflet yang disebar di Cirebon dan Banyuwangi. Pamflet-pamflet itu ditandatangani oleh van Mook. Berita pertama dari front Semarang mengatakan bahwa Belanda pada pukul 07. 30 WIB mulai melancarkan serangan dengan didahului bombardemen, diantaranya di Gunungpati (sektor barat daya) (Nasution, 1978: 101).

Di setiap sektor Belanda menyerang dengan kekuatan satu brigade tim pertempuran yang berdiri sendiri. Tiap brigade dilengkapi dengan eskadron berlapis baja, pasukan artileri dan pasukan zeni yang modern untuk segera membetulkan jalan, membebaskannya dari ranjau darat dan memasang *jembatan baily* jika diperlukan. Tiap brigade didahului oleh sebuah batalyon infantry yang diperkuat dengan tank, artileri dan pasukan pionir untuk memelopori penerobosan.

Tanggal 22 Juli 1947 sasaran musuh adalah Tuntang dan Bringin untuk merebut pusat Tenaga Listrik dan Ambarawa-Bedono di jalan raya ke Magelang. Sementara tanggal 23 Juli pukul 13.15 kota Magelang diserang oleh pesawat pemburu Belanda yang melepaskan tembakan-tembakan metralyur dan menjatuhkan granat tangan. Pesawat-pesawat itu mengadakan pula serangan-serangan terhadap Blabag. Granat-granat itu jatuh di tengah sawah dan tidak menimbulkan korban. Pukul 13.30 WIB Belanda mengadakan serangan udara terhadap Pringsurat Temanggung.

Semua badan-badan perjuangan Magelang dikerahkan ke seluruh front. Diantaranya ke front Ngablak, front Ngasinan, front Pingit sementara Belanda ada di Banaran, front Nglarangan (Grabag), front Candirotto, front-front di Surakarta, Semarang dan kota-kota lain. Tidak hanya terbatas pada front Jawa Tengah tetapi juga diperbantukan pada front di luar Jawa Tengah seperti di Purwakarta (Jawa Barat), di Karawang dan sebagainya.

Para pejuang bergerak hanya pada malam hari, sementara siang harinya menyamar menjadi rakyat biasa yang sehari-hari hanya beraktivitas di ladang sebagai petani. Oleh karena itu pada saat pasukan Belanda melakukan patroli ke daerah-daerah yang telah dikuasai, mereka tidak pernah menemukan tentara Indonesia maupun para pejuang. Sementara jika ada serangan dari tentara Belanda yang biasanya terdeteksi melalui bunyi sirene, rakyat akan segera berlari mencari tempat persembunyian. Di kampung-kampung berbunyi kentongan-kentongan tanda bahaya. Para pejuang akan segera bersiap siaga dan berkumpul di markas masing-masing yang tersebar di berbagai perkampungan. Saat itu para pejuang kita hanya bertahan tanpa berani menyerang karena peralatan dan senjata yang tidak seimbang. Tentara menggunakan senjata modern dan lengkap sementara pejuang kita hanya menggunakan bambu runcing, golok dan peralatan tradisional lainnya. TNI bersenjata karaben dan senjata api peninggalan Jepang dan Belanda sebelumnya. Setelah malam hari tiba para pejuang baru berani menandatangani tangsi-tangsi tentara Belanda. Tetapi masih belum berani mengadakan serangan, hanya jika kebetulan bertemu dengan tentara Belanda, pejuang kita berani membunuh (Yatimin, wawancara tanggal 18 Agustus 2005).

Sebenarnya Belanda menghadapi banyak rintangan dan penghalang dalam gerakan penyerbuannya. Dimana-mana di jalan-jalan penuh dengan parit-parit dan ranjau darat, penuh rintangan berupa pohon-pohon yang ditumbangkan, penuh reruntuhan tebing di pengkolan jalan dan

jembatan banyak yang dihancurkan. Penuh aneka macam penghalang yang dibuat rakyat desa, seperti pagar kayu, tumpukan batu, gerobag-gerobag yang dimalang-merintangkan dan sebagainya. Dimana-mana rakyat dan tentara dengan segala daya upaya menghambat masuknya tentara Belanda.

Semua jembatan-jembatan di Magelang yang menghubungkan antara Magelang kota dengan kecamatan-kecamatan di sebelah selatan dan utara kota seperti jembatan kali elo, jembatan krasak, jembatan brangkal dan lainnya dipasang bom untuk menghambat masuknya tentara Belanda. Tetapi usaha pemboman itu tidak pernah sampai menghancurkan jembatan. Jembatan-jembatan itu hanya hancur di bagian-bagian tertentu sehingga dalam waktu sekejab tentara Belanda berhasil membenahi dengan peralatannya yang lengkap sehingga tetap bisa masuk ke daerah-daerah di luar kota Magelang (Muh Sakeh, wawancara tanggal 22 Agustus 2005).

Tentara Belanda yang ada di Semarang mendapat rintangan dari penduduk di sekitar Spondol. Para pejuang menanam ranjau sehingga Belanda tidak dapat melanjutkan perjalanan. Mereka bergerak dari Gunungpati dan akhirnya dapat menduduki Ungaran. Dari Ungaran pasukan Belanda dibagi menjadi 2, sebagian ke arah Karangjati, Kelpu, Beringi Delik dan sebagian lagi bergerak ke arah Bawen lalu Ambarawa. Belanda bergerak ke arah selatan hanya sampai di Pingit dan Banaran saja. Mereka mendapat perlawanan yang gigih dari para pejuang dan jalan penghubung ke arah Kedu telah terputus karena dirusak oleh pasukan Indonesia sehingga mereka mundur ke Ambarawa. Pertahanan pasukan

TNI disepanjang jalan Pingit-Ngipik kuat karena didukung medan dan bentang alamnya yang naik turun dan berkelok-kelok (Soedjoet Mangkudihardjo, wawancara tanggal 22 Agustus 2005).

Agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 menimbulkan reaksi yang hebat dari dunia internasional. Beberapa Negara antara lain Inggris, Amerika, Australia, India, dan Syiria menyatakan simpatinya terhadap Indonesia dengan menyatakan kekecewaannya atas tindakan Belanda itu. Pada tanggal 30 Juli 1947 pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan. Permintaan itu diterima baik dan pada tanggal 31 Juli dimasukkan sebagai acara pembicaraan Dewan Keamanan. Tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak (Poesponegoro, 1993: 140). Tanggal 4 Agustus 1947, kedua belah pihak diperintahkan untuk mengadakan gencatan senjata dan pertikaian itu akan diselesaikan oleh Komisi Tiga Negara (KTN) (Adiwiratmoko, 1998: 74).

BAB IV

PERJUANGAN RAKYAT MAGELANG MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN TAHUN 1948/1949

A. Situasi Magelang setelah Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan menjelang Agresi Militer Belanda II tahun 1948/1949

Tujuan utama Agresi militer Belanda I adalah untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Jawa, Madura dan Sumatra. Dengan demikian maka Republik Indonesia akan menjadi lemah dan TNI akan terdesak ke daerah yang sempit. Serangan-serangan Belanda itu dengan tegas mendapat reaksi dunia internasional. Kementrian Luar Negeri Inggris menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan Belanda ini. Mahasiswa-mahasiswa dan kaum buruh Australia berdemonstrasi di muka kedutaan Belanda. Beberapa negara di Asia menyatakan simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia dalam membela tanah airnya sehingga mengajukan protes atas serangan Belanda itu kepada Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) (Kansil, 1968: 50).

Perbedaan-perbedaan sikap antara Republik Indonesia dengan Belanda semakin meruncing. Hal ini mendapat perhatian dari Dewan Keamanan PBB. Terbentuknya Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari tiga negara anggota PBB, yaitu Amerika, Australia dan Belgia diharapkan menjadi penengah antara Indonesia-Belanda. Ketiga negara itu diwakili oleh Richard C. Kirby (Australia), Dr. Frank Graham (Amerika) dan Paul van Zeeland (Belgia). Sejak awal pembentukan KTN telah bekerja mempertemukan kedua belah pihak (Masjkuri, 1976: 292).

Amerika Serikat mengajukan usul kompromi yang kemudian diterima oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 1 Agustus 1947. Isinya mendesak Belanda dan RI untuk :

1. Menghentikan konflik antara Belanda-Indonesia
2. Menyelesaikan perselisihan mereka dengan bantuan Komisi Arbitrase atau cara damai lainnya dan melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB segala kemajuan yang dicapai.

Pada tanggal 3 Agustus 1947 pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB dan memerintahkan kepada van Mook agar penghentian tembak-menembak dilaksanakan mulai malam hari tanggal 4-5 Agustus 1947, begitu juga RI. Namun kedudukan tentara kedua belah pihak tidak menjamin stabilitas penghentian tembak-menembak. Banyak pelanggaran oleh pihak Belanda dengan membiarkan tentaranya bergerak terus dalam pengepungan atas daerah RI (Moedjanto, 1988: 16).

Atas usaha KTN perundingan antara Belanda dan Indonesia terus diusahakan. Perundingan itu berlangsung pada tanggal 8 Desember 1947 di atas sebuah kapal milik Amerika, yaitu Renville, yang berlabuh di teluk Jakarta. Hasil perundingan itu ditandatangani tanggal 17 Januari 1948 yang isinya adalah:

1. 10 pasal persetujuan gencatan senjata
2. 12 pasal prinsip-prinsip politik
3. 6 prinsip tambahan dari KTN

Dari 12 pasal prinsip-prinsip politik inilah yang antara lain mengakibatkan kantong-kantong daerah Republik menjadi semakin sempit, karena garis "van Mook". Garis van Mook adalah garis batas (demarkasi) antara daerah kedudukan masing-masing pihak pada saat genjatan senjata diselenggarakan, yang oleh van Mook pada tanggal 29 Agustus 1947 diumumkan secara sepihak dengan menunjukkan wilayah-wilayah yang diduduki oleh Belanda. Dengan begitu maka TNI harus meninggalkan daerah-daerah yang telah diduduki Belanda. Akibatnya pada bulan Februari 1948 kira-kira sejumlah 35.000 orang anggota Divisi Siliwangi Jawa Barat harus dihirahkan ke Jawa Tengah, yang sebagian juga ditempatkan di kota Magelang (Adiwiratmoko, 1998: 74-75).

Akan tetapi persetujuan di atas menyebabkan timbulnya pertentangan di antara para pemimpin dan berbagai golongan bangsa Indonesia. PNI dan Masyumi menolak perjanjian tersebut dan tidak bersedia lagi duduk di dalam kabinet Mr. Amir Syarifuddin. Kabinet Amir Syarifudin kemudian digantikan oleh kabinet Hatta pada tanggal 29 Januari 1948 (Masjkuri, 1976: 292).

Kabinet Hatta mulai menjalankan programnya. Salah satunya adalah rekonstruksi dan rasionalisasi (yang dikenal dengan Re-ra) Angkatan Perang Republik Indonesia. Re-ra bertujuan menyempurnakan organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Pada tanggal 4 Mei 1948, presiden mengeluarkan penetapan yaitu Penetapan Presiden No. 14 tahun 1948 yang isinya antara lain bahwa sejak tanggal 15 Mei 1948, dibentuk kesatuan Mobil

dan Teritorial tersusun dalam komando Jawa dan Sumatra yang terdiri atas Divisi dan Sub-Teritorial, staf AD dimasukkan ke dalam staf BP AP, penurunan pangkat satu tingkat, dan kesatuan laskar dimasukkan ke dalam Divisi TNI (Notosusanto, 1973: 12). Demikian juga di Magelang. Semua badan-badan kelaskaran yang ada melebur menjadi anggota TNI. Namun tidak semuanya, masih banyak dari anggota kelaskaran yang tidak bersedia masuk TNI dan memilih menjadi rakyat biasa tetapi masih ikut berjuang (Karyo Mudji, wawancara tanggal 18 Agustus 2005).

Reaksi negatif terhadap Re-ra adalah pemberontakan PKI Madiun di bawah pimpinan Muso dan kawan-kawannya yang akan mendirikan negara Sovyet Indonesia (Republik Merah). Maka pasukan Siliwangi yang telah hijrah ke Jawa Tengah sebagian beserta kesatuan-kesatuan yang lain ditugaskan ke sana. Beberapa anggota Tentara Pelajar yang pada waktu itu sekolahnya ditampung di SMA Peralihan Magelang ikut ditugaskan menumpas pemberontakan PKI Madiun itu (Adiwiratmoko, 1998: 75).

Penumpasa pemberontakan PKI Madiun ini secara menyeluruh dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan sejak meletus pada tanggal 18 September 1948. Pasukan-pasukan kita memburu gerilya merah di pegunungan-pegunungan Madiun, di daerah Blora dan Pati. Jadi pasukan-pasukan Indonesia sebagian besar masih terlibat dalam operasi anti gerilya dan belum dapat dipersiapkan untuk menghadapi serangan Belanda. Sementara penyelesaian itu belum selesai, para tokoh kita paksakan menarik

pasukan secara berangsur-angsur ke pangkalan masing-masing (Nasution, 1979: 168).

Pertikaian antara Indonesia dengan Belanda sebagai akibat adanya perjanjian Renville dan penumpasan PKI memberikan kesempatan kepada Belanda untuk lebih menekan RI. Perundingan-perundingan yang dilakukan dibawah pengawasan KTN selalu menemui jalan buntu. Bagi bangsa Indonesia telah yakin bahwa Agresi Militer Belanda II akan terjadi. Karena itu dipercepat pembuatan instruksi Panglima Besar tanggal 9 November 1945 dan konferensi dengan semua komandan daerah, gubernur dan residen pada tanggal 11 November 1948. Dalam konferensi ini dijelaskan tindakan-tindakan yang harus diambil. Atas dasar ini maka tiap-tiap daerah masih sempat mengadakan tindakan-tindakan persiapan yang sama sehingga kita tinggal menunggu saja saatnya.

Dengan Komandan Militer kota Jogjakarta telah diatur pula tempat pengungsian komando pertama dalam kota dan kemudian ke luar kota. Begitu juga telah disiapkan tempat-tempat pengungsian untuk panglima Besar dan Soekarno-Hatta. Sementara itu Jenderal Sudirman terpisah dari staf dan mengatur pengungsian sendiri yang disiapkan oleh Kolonel Santoso, yakni menyingkir ke Jawa Timur. Panglima Divisi III, Kolonel Bambang Sugeng telah mengadakan rapat pada tanggal 11 November 1948 di Magelang, yang merencanakan persiapan-persiapan dalam menghadapi Agresi Militer Belanda, yang dihadiri oleh semua Komandan Brigade dan Perwira staf.

Arah pertahanan divisi II dan III di Jawa Tengah mengikuti jalan raya yang menuju ke Semarang-Purwokerto. Sejak hari-hari terakhir telah dimulai mengadakan rintangan-rintangan dan perusakan-perusakan jalan sepanjang kurang lebih 10 km dengan samaran latihan umum (Nasution, 1979: 182-183).

Pengalaman-pengalaman dari Agresi Militer Belanda I dapat dipergunakan untuk mengadakan langkah-langkah selanjutnya dalam mempertahankan Republik Indonesia. Untuk itu TNI telah mengadakan persiapan-persiapan sebagaimana diatur di dalam Perintah siasat No. 1 tahun 1948. Dengan demikian pasukan-pasukan TNI sudah mempunyai tugas-tugas tertentu sebagaimana digariskan dalam perintah tersebut.

Pada permulaan bulan Desember 1948, didapat laporan dari pihak intelijen bahwa ada gerakan dan persiapan yang luas di pihak Belanda. Oleh karena itu maka diperintahkan kepada para Panglima untuk memulai merusak jalan-jalan menuju ke garis demarkasi, mengungsikan barang-barang yang penting, memulai persiapan bumi hangus, penempatan pasukan-pasukan pada kedudukan yang sudah direncanakan. Selain itu menentukan tempat-tempat bagi kedudukan markas rahasia dan persiapan-persiapan yang perlu agar tenaga-tenaga gerilya dapat diungsikan secara utuh ke kantong-kantong yang telah direncanakan. Supaya tidak mempersulit jalannya perundingan politik, segala kesibukan itu diselubungi dengan "latihan umum" (Notosusanto, 1973: 15-16).

B. Agresi Militer Belanda II tahun 1948/1949

Pertikaian antara Indonesia dengan Belanda sebagai akibat adanya perjanjian Renville dan penumpasan PKI memberikan kesempatan kepada Belanda untuk lebih menekan RI. Perundingan-perundingan yang dilakukan dibawah pengawasan KTN selalu menemui jalan buntu, sebab memang Belanda sengaja mengemukakan hal-hal yang tidak mungkin diterima RI. Pada tanggal 11 Desember 1948, para penguasa Belanda memberi tahu komisi jasa baik (KTN) bahwa benar-benar tidak mungkin mencapai persetujuan dengan para pemimpin Republik dan bahwa perundingan dengan bantuan komisi-komisi itu akan sia-sia pada tahap ini. Mereka mengatakan akan terus maju dan membentuk suatu pemerintahan federal sementara tanpa Republik, meskipun republik akan diberi suatu tempat jika kelak masuk (Kahin, 1995: 425).

Situasi antara Indonesia-Belanda semakin gawat, akhirnya pada tanggal 13 Desember 1948, Bung Hatta meminta kembali KTN untuk menyelenggarakan perundingan dengan Belanda, bahkan dengan syarat "kesediaan RI mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan". Pada tanggal itu juga pukul 23.30 Riphagen dari delegasi Belanda datang ke rumah Mr. Sujono, sekretaris delegasi Indonesia untuk menyampaikan pemberitahuan tentang sikap Belanda yang menyatakan tidak mengakui lagi perjanjian gendat senjata. Berita ini tidak dapat disampaikan ke Jogjakarta karena hubungan telepon telah diputus (Nasution, 1979: 161).

Kabar pertama pembatalan persetujuan Renville di Jogjakarta berupa serbuan pada tanggal 19 desember 1948 pukul 5. 30 pagi. Penyerangan dilakukan dengan pemboman atas lapangan terbang Maguwo dan beberapa bangunan penting di Jogjakarta seperti RRI. Lalu diikuti penerjunan 900 pasukan payung disusul kemudian kesatuan-kesatuan lain. Dalam memasuki Jogja, mereka dibantu oleh KNIL, pasukan Belanda terdiri dari orang-orang pribumi (Moedjanto, 1988: 42). Setelah mengalahkan pasukan Indonesia yang mempertahankan pangkalan udara itu dalam 1 jam serangan berat bom dan roket, sekitar 500 tentara Belanda diterjunkan dengan payung udara. Dengan cepat mereka menguasai wilayah itu, terus menerus membawa pasukan dan perbekalan Belanda dari pangkalan udara Semarang dengan serangan oleh Brigade Marinir Belanda. Bom dan roket dijatuhkan di berbagai tempat, kebun yang ditempati militer dan tengah kota Jogjakarta (Kahin, 1995: 427).

Mereka berhasil menawan Presiden Soekarno dan wakil presiden M. Hatta bersama sejumlah menteri yang kemudian diasingkan ke pulau Bangka. Tetapi sebelumnya, Presiden masih sempat mengirimkan radiogram berisi pemberian kekuasaan kepada Menteri Kemakmuran Syarifudin Prawiranegara yang berada di Sumatra untuk membentuk dan memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selain di Sumatra kepala Mr. AA Maramis, LN Dalar dan dr. Soedarsono juga diberi mandat untuk melakukan hal sama bila PDRI di Sumatra tidak berhasil dibentuk (Lapian, 1996 : 5).

Belanda kemudian menyiarkan ke seluruh dunia bahwa perlawanan RI sama sekali tak berarti dan rakyat menyambut kedatangan tentara Belanda sebagai pembesar. Agar berita yang benar tidak sampai tersiar luas terutama ke luar negeri, Belanda melakukan sensor pers yang keras sampai 1 Januari 1949. Permintaan KTN untuk melakukan peninjauan dari udara ditolak, bahkan anggota-anggota militernya dipersilahkan berangkat ke Jakarta dan ditawan sampai 7 Januari. Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pendudukan atas daerah RI sudah merupakan kenyataan dan bahwa RI sudah mati. Pers di Indonesia dicekal, tetapi RI masih memiliki 4 orang diplomat di luar negeri, yaitu Palar, Sudjatmoko, Sumitro dan Sudarpo. Merekalah yang dengan leluasa membela RI di luar negeri. Di samping itu RI masih mempunyai radio gerilya yang sanggup memancarkan berita penyerangan dan perlawanan rakyat ke luar negeri (dari Jawa dikirim ke Sumatra, dari Sumatra ke Rangoon terus ke New Delhi) (Moedjanto, 1988: 43).

Dalam waktu yang singkat Belanda berhasil menduduki semua ibu kota karesidenan dan hampir semua ibu kota kabupaten di Republik, kecuali daerah Aceh. Berita-berita radio Belanda dan koran-koran Belanda memuat kabar yang sangat baik bagi Belanda, yaitu Angkatan Perang Republik telah kacau, bumi hangus berhasil dihindari Belanda, persediaan-persediaan TNI telah dirampas, para pemimpin telah ditawan, rakyat telah mulai bekerjasama dengan Belanda, sehingga dalam waktu yang singkat sisa-sisa TNI akan dapat dibersihkan seluruhnya dan keadaan akan kembali aman (Simatupang, 1980: 149).

Dengan menduduki Jogjakarta, pusat pemerintahan RI, Belanda mengira bahwa riwayat RI akan segera berakhir. Akan tetapi pemimpin-pemimpin telah memperhitungkan segala kemungkinan. Pemerintah darurat segera menjalankan tugasnya. Mr. Syarifudin Prawiranegara yang ada di Sumatra bertindak sebagai Kepala Pemerintah Darurat. Panglima Besar Jenderal Sudirman menyingkir dari Jogjakarta dan masuk ke daerah pedalaman. Di sana diatur pertahanan dan dipikirkan siasat penyerbuan. Di desa-desa, di lereng-lereng gunung TNI menyiapkan diri untuk melakukan perang gerilya (Kansil, 1968: 53).

Seluruh kekuatan yang masih ada di kota Jogjakarta diperintahkan keluar dari kota untuk bergerilya dan dipimpin oleh panglima Besar Jenderal Soedirman. Angkatan Perang telah membagi wilayah pertahanan Republik menjadi dua komando, yaitu Jawa dan Sumatra. Panglima Tentara dan Teritorium Jawa dijabat oleh kolonel A.H. Nasution dan pada tanggal 22 Desember 1948 telah mengumumkan berdirinya pemerintahan Militer untuk Jawa. Dengan modal pengalamannya, kolonel A.H. Nasution telah menyiapkan konsepsi baru di bidang pertahanan, yang kemudian dituangkan dalam Perintah Siasat No. 1 tahun 1948 (Adiwiratmoko, 1998: 80).

C. Perjuangan Rakyat Magelang Melawan Belanda tahun 1948/1949.

a. Pemboman 3 jembatan di Magelang

Pada tanggal 19 Desember 1948, pasukan belanda melakukan penyerangan ke Jogjakarta. Bersamaan dengan itu pasukan belanda yang

berkedudukan di Gombong sejak Agresi Militer Belanda I mulai bergerak ke arah timur menuju Purworejo. Sesampainya di Purworejo keadaan telah sepi dari aktivitas pemerintahan sipil maupun militer dan di sepanjang jalan kota Purworejo tampak gedung-gedung telah rata dengan tanah. Kemudian pasukan Belanda dari Brigade W membagi diri menjadi 3 Batalyon. Batalyon I bergerak menuju Magelang, Batalyon 2 tetap tinggal di Purworejo dan Batalyon 3 bergerak ke selatan menuju Jogjakarta melewati Wates. Pasukan Belanda yang sedang bergerak ke Wates tidak bisa melanjutkan perjalanan karena jembatan Bogowonto telah terputus sehingga mereka mengikuti batalyon I, yaitu menuju Magelang (Priadji, 1997: 80).

Sementara itu berita penyerangan Belanda di Jogjakarta telah sampai di kecamatan Salam. Untuk menghadang gerak maju pasukan Belanda menuju Magelang, TNI maupun penduduk desa Salam berusaha memutus jembatan Krasak, yang menghubungkan antara Kabupaten Magelang dengan Daerah Istimewa Jogjakarta. Alat penghancur yang digunakan adalah trekbom yang dipasang pada bagian salah satu pondasi ujung jembatan. Tetapi hasilnya hanya berlubang sehingga pasukan Belanda dengan cepat dapat masuk tanpa perlawanan (Soetarmo, wawancara tanggal 18 Agustus 2005). Bersamaan itu mereka mendirikan *Regening Commissie vor Aangelehaden (RECOMBA)*, yang merupakan Pemerintah Pendudukan Belanda pertama di Magelang.

Sementara itu berita jatuhnya Jogjakarta belum diterima secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Ketika itu bertepatan dengan

hari minggu yang menyebabkan tutupnya semua aktivitas pemerintahan sipil maupun militer di Magelang. Dengan demikian tutupnya kantor-kantor pemerintahan menimbulkan berita yang seharusnya sudah sampai menjadi terlambat, ditambah lagi desa Salam telah diduduki oleh Belanda dan komunikasi antara Jogjakarta dengan Magelang terputus total.

Menghadapi kemungkinan masuknya pasukan belanda ke Magelang, pada hari itu juga pejabat-pejabat pemerintah sipil maupun militer mengadakan pertemuan di Aula Kantor Kabupaten Magelang. Dalam pertemuan itu dihadiri oleh pejabat-pejabat pemerintah seperti raden Moekahar Ronohadiwidjojo, walikota Magelang, raden Joedodibroto, Bupati Magelang, patih Sumarsono, Letnan Kolonel Ahmad Yani, dan Letnan Kolonel Moh. Sarbini. Mereka membahas tentang strategi menghadap pasukan Belanda (Priadji, 1997: 81).

Tanggal 20 Desember 1948, pasukan Belanda yang berasal dari Jogjakarta masuk kota Magelang. Begitu memasuki kota keadaan telah lengang tak ada rakyat yang masih tinggal. Rakyat kota telah berbondong-bondong mengungsi ke luar kota. Sebagian dari mereka mengungsi ke arah timur melewati jembatan sungai Elo dan sebagian lagi ke arah barat melewati jembatan sungai Progo.

Setelah rakyat memasuki kecamatan Tegalrejo dan Candimulyo, jembatan Elo langsung di pasang bahan peledak oleh TNI untuk dihancurkan agar pasukan belanda tidak dapat melewatinya. Seperti halnya di jembatan Krasak, penghancuran jembatan Elo menggunakan trekbom

yang dipasang pada salah satu ujung pondasi sebelah timur jembatan. Setelah meledak ternyata jembatan hanya berlubang tanpa kerusakan yang berarti (Muh Sakeh, wawancara tanggal 22 Agustus 2005).

Demikian juga di daerah timur, setelah rakyat berhasil melewati jembatan sungai Progo, jembatan itu langsung dipasang bahan peledak oleh TNI beserta penduduk dengan cara yang sama dengan jembatan-jembatan yang lain dan ternyata juga tidak menyebabkan kerusakan yang berarti tapi hanya berlubang pada bagian ujung sebelah timur jembatan (Zakaria, wawancara tanggal 26 Agustus 2005).

b. Kota Magelang dibumi hanguskan

Mendengar bahwa Belanda sudah menduduki Kota Yogyakarta, maka Magelang mulai melaksanakan siasat “Bumi Hangus”. Semua gedung-gedung Kantor Pemerintah, markas-markas, tangsi Militer, sekolah-sekolah, dan gedung-gedung yang penting lainnya kecuali tempat-tempat ibadah dibumihanguskan. Pemerintahan Sipil dan Militer serta seluruh Pasukan Pejuang mundur keluar Kota. Saat itu Belanda masuk melalui kecamatan Salam. Sesampainya di Magelang, pasukan Belanda tidak menemukan aktivitas pemerintahan sipil maupun militer. Di sepanjang jalan menuju kota Magelang tidak ada gedung yang utuh. Di mana-mana hampir semua gedung telah terbakar. Bersamaan dengan itu pasukan Belanda dari kesatuan Zeni berusaha membangun kembali gedung-gedung itu (Karyo Mudji, wawancara tanggal 18 Agustus 2005).

Gedung-gedung di kota Magelang yang hancur akibat bumi hangus adalah sebagian tangsi militer dan kader School, sebagian gedung kantin militer, gedung kantor kawedanan Bandongan di jalan Plengkung 1 (sekarang SMP Negeri 2), gedung SR IV (sekarang untuk Balai Pelajar), gedung Pengadilan Negeri Boton, gedung SMP Negeri I di jalan Pahlawan, gedung Kesenian Panti Peri, gedung SD di sepanjang jalan Pahlawan, hotel Nitaka (sekarang kantor Polwil Kedu), gedung-gedung di sepanjang jalan Veteran, gedung markas Mobile Brigade Polisi di Karesidenan, markas ALRI di jalan Diponegoro, Kantor dan Pendopo Kabupaten Magelang, Gedung Balai Pemuda (sekarang Bank BCA), gedung Asia Raya, hotel LOZE (sekarang gedung Magelang Teater), gedung bioskop Roxy (sekarang Gardena), gedung Susteran (sekarang SMK Pius X), gedung MOSVIA (sekarang POLRESTA Magelang), gedung Kantor Kepolisian di jalan Gejuron, dan lain-lain.

Sejak hari Senin pagi tanggal 20 Desember 1948 Kota Magelang menjadi lautan api akibat siasat Bumi Hangus, disamping pasukan yang mengundurkan diri dan siap untuk mengadakan perang gerilya, rakyat kotapun berbondong-bondong mengungsi keluar Kota. Juga pasukan Divisi Siliwangi yang berada di Magelang akibat persetujuan Renville, bersiap untuk mengadakan “long mars” kembali ke Jawa Barat bersama keluarganya untuk mengadakan perang gerilya disana. Pada hari Rabu sore tanggal 22 Desember 1948 itu ada perintah bahwa semua Pasukan yang masih berada di dalam Kota (masih melaksanakan bumi hangus) supaya

segera keluar meninggalkan Kota, sebab jembatan sungai Progo segera akan dihancurkan dengan trekbom kita (Adiwiratmoko, 1998: 81).

Pada hari Rabu wage malam tanggal 22 Desember 1948, Belanda masuk Kota Magelang dari arah Jogjakarta dan Purworejo. Pasukan Belanda terus mengejar keluar kota, tetapi di Kaliangkrik (Daerah Kawedanan Bandongan) mendapat perlawanan sengit dari pasukan kita. Waktu itu ada 2 pesawat capong Belanda terbang berputar-putar di atas Kaliangkrik. Kemudian kedua pesawat itu berpisah menuju tujuannya masing-masing. Beberapa saat kemudian, pesawat capong itu datang kembali dengan terbang rendah sambil menembakkan rentetan senapan otomatis yang diarahkan ke rumah-rumah penduduk. Dua penduduk Kaliangkrik tertembak mati, yaitu Ribut dan Soeparni yang sedang hamil tua.

Sementara itu di pasar Kaliangkrik ada beberapa anggota pasukan Siliwangi sudah mempersiapkan senjata jenis metralyur ukuran 2,3 yang akan ditembakkan ke arah pesawat capong tersebut. Ketika pesawat itu datang kembali dan terbang rendah, maka pasukan Siliwangi menembakkan senjata metralyur ke arah badan pesawat. Hasil tembakan itu mengenai bagian ekor pesawat sehingga kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh di sekitar pasar Kaliangkrik. Selain itu pasukan kita juga berhasil menembak jatuh pesawat capong di daerah Kalegen, sehingga pasukan kita mendapat tambahan 6 (enam) pucuk senjata otomatis berukuran 12,7 dari pesawat yang jatuh itu (Sapuan, wawancara tanggal 14 Agustus 2005).

Sedangkan di kawedanan Cadimulyo, pasukan Belanda hampir tiap hari melakukan patroli dengan menyeberang sungai Elo. Mereka tidak terdiri dari orang-orang Belanda namun banyak juga yang asli pribumi. Saat melakukan patroli pasukan Belanda yang berasal dari penduduk pribumi sering melakukan pengambilan secara paksa terhadap barang-barang berharga milik penduduk seperti emas, baju-baju, mahan makanan dan binatang ternak. Penduduk juga dipaksa membawakan barang-barang itu secara bergantian dari satu dusun ke dusun lain hingga sampai ke markas pasukan Belanda. Pada suatu hari pasukan TNI dan penduduk di bawah pimpinan Letnan II Saroyo mengadakan perlawanan namun diketahui oleh pasukan Belanda sehingga begitu berhadapan dengan Belanda tembakan senapan tentara belanda telah mengenai pasukan TNI. Dalam peristiwa ini Letnan II Saroyo gugur dengan seorang anak buahnya, sementara yang lain berhasil melarikan diri berlindung ke hutan-hutan (Soedjod Mangkudihardjo, wawancara tanggal 22 Agustus 2005)

Baik pasukan TNI maupun pasukan dari badan-badan kelaskaran di Magelang hampir setiap malam secara bergantian dan kadang bersama-sama menyerang kedudukan pasukan Belanda di tangsi-tangsi di kota. Pada siang hari ada beberapa tentara atau laskar yang menyamar menjadi pedagang atau apa saja dan pergi mendekati tangsi-tangsi Belanda di kota untuk menyelidiki keberadaan dan kekuatan pasukan Belanda. Informasi itu kemudian dilaporkan kepada kepala Batalyon dan malamnya diadakan penyerangan (Yatimin, wawancara tanggal 18 Agustus 2005).

c. Strategi gerilya rakyat Magelang

Magelang bila dilihat dari kondisi geografisnya terletak di tengah-tengah pulau Jawa (khususnya Jawa Tengah). Salah satu ciri khas daerahnya adalah terdapat gunung-gunung, yaitu gunung Sumbing di sebelah barat, gunung Telomoyo dan Andong di sebelah utara, gunung Merapi dan Merbabu di sebelah timur dan pegunungan Menoreh di sebelah selatan. Selain itu daerah Magelang dibatasi oleh dua sungai besar, yaitu sungai Progo yang berada di sebelah barat dan sungai Elo yang berada di sebelah timur.

Kondisi geografis Magelang yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit maka akan mempermudah mengatur strategi pertahanan dan perlawanan rakyat terhadap Belanda. Para pejuang Magelang melakukan perlawanan dengan bergerilya dari satu daerah ke daerah yang lain. Di semua perbukitan dan pegunungan serta daerah-daerah atau dusun-dusun yang agak tinggi digunakan sebagai tempat bergerilya pasukan TNI maupun badan-badan kelaskaran. Selama berada di tempat-tempat itu mereka mendapat makanan dari para penduduk, tetapi seadanya. Cukup hanya nasi dengan sayur nangka tanpa lauk. Minum juga tidak selalu air rebusan tetapi kadang dari air sungai (Muhsinun, wawancara tanggal 22 Agustus 2005).

Daerah Magelang dibagi menjadi 2 medan pertahanan, yaitu medan Pertahanan Barat (tertutup) dan medan pertahanan timur (terbuka). Pembagian ini didasarkan pada letak geografis daerah Magelang dan

pemusatan pemerintah sipil maupun militer sehingga dapat diketahui letak konsentrasi kekuatan TNI.

Pertama, medan pertahanan barat daerahnya adalah sepanjang sungai Progo yang mengalir ke arah selatan, meliputi kecamatan Bandongan, Windusari, Kajoran yang terletak di lereng gunung Sumbing, dimana banyak pegunungan yang saling berdekatan sehingga sangat bermanfaat untuk tempat perlindungan dari serangan pesawat terbang maupun meriam.

Kedua, medan pertahanan timur cenderung bersifat terbuka karena daerah ini jarang terdapat hutan yang tumbuh di daerah pegunungan seperti di daerah pertahanan barat. Daerah ini meliputi kecamatan Tegalrejo, Pakis, Candimulyo, Srumbung, dan Grabag. Hal ini dibuktikan dengan pasukan Belanda apabila hendak mengadakan patroli biasanya melewati daerah Muntilan atau Grabag sebab jembatan sungai Elo yang menghubungkan antara kota Magelang dengan kawedanan Tegalrejo dan sekitarnya setelah diputus oleh TNI (Priadji.1997:73).

Pada tanggal 19 Desember 1948 pagi-pagi, berpuluh-puluh kapal terbang lewat di atas kota Magelang terbang ke arah tenggara dengan kawalan dua pesawat pemburu yang terbang cepat. Sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman kepada Angkatan Perang yang antara lain berisi “semua Angkatan Perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda” yaitu dengan strategi perang gerilya. TNI dan para pejuang Magelang

melanjutkan perlawanan dengan strategi gerilya Pula. Hal ini juga sesuai dengan konsepsi Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, kolonel A.H. Nasution tentang strategi pertahanan yang dituangkan dalam Perintah Siasat No. 1 tahun 1948, yang isinya adalah:

1. Tidak melakukan pertahanan yang linier.
2. Memperlambat setiap majunya serbuan musuh, pengungsian total dan bumi hangus.
3. Membentuk kantong-kantong di tiap onderdistrik yang mempunyai kompleks di beberapa pegunungan.
4. Pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal menyusup ke belakang garis musuh (wingate) dan membentuk kantong-kantong sehingga seluruh pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas (Adiwiratmoko, 1998: 80).

Di luar kota, pasukan kita terus mengadakan konsultasi dan konsolidasi, mengatur siasat perang gerilya, menyusun sektor-sektor pertahanan dan perlawanan dibawah komando Mayor Soeryosumpeno selaku komandan Batalyon dengan Komandan-komandan kompinya, yaitu Kapten Abdulhadi, Kapten Sarwo Edi, Kapten Soerjana dan Kapten Soegiarto. Dari Pasukan Artileri dibawah Komando Ateng Yogasara. Dari pasukan lain seperti dari Hizbullah dibawah pimpinan Abu Sajak, dari KRIS dibawah pimpinan Letnan Kampak, dari Tentara Pelajar dibawah pimpinan Agus Sumarno. Kapten Dulhadi dan Kapten Ateng ditugaskan untuk mengkoordinir pasukan yang berada di sebelah barat sungai Progo, untuk

mengadakan perlawanan secara kuncing-kucingan (Adiwiratmoko, 1998: 83).

Markas-markas pejuang yang dulu berada di kota, pada masa ini berada di gunung-gunung, yaitu di pegunungan Menoreh, di gunung Merapi, di gunung Sumbing, dan di dataran-dataran tinggi di sekeliling kota (Simatupang, 1980: 36).

Tindakan-tindakan penyerangan yang dilakukan TNI dan badan-badan kelaskaran serta penduduk yang bergerilya tidak membuat tenang kedudukan Belanda. Serangan-serangan mendadak dan penghadangan-penghadangan hampir tiap hari terjadi. Dan ini dilakukan dengan bantuan penuh dari rakyat. Rakyat tidak hanya ikut memanggul senjata dalam perang tetapi juga membantu dalam bentuk materi, misalnya dengan mendirikan dapur umum untuk menjamin makanan bagi para gerilyawan. Serangan mendadak, pengrusakan gedung dan jembatan, penebangan pohon-pohon untuk menghadang datangnya pasukan Belanda dikerjakan oleh rakyat dengan bimbingan pasukan TNI.

Masa perang gerilya ini peranan rakyat sangat besar dalam menyediakan makanan bagi para gerilyawan. Di desa-desa terdapat kelompok-kelompok yang mengurus dapur umum. Biasanya sering disebut dengan istilah BOM (Bagian Oerosan Makanan). Dengan dikoordinir oleh istri kepala desa, maka masing-masing dusun sudah mempersiapkan tempat-tempat pembagian makanan maupun markas untuk sementara (Suswanto, wawancara tanggal 18 Agustus 2005).

D. Akhir pendudukan Belanda dan situasi Pemerintahan di Magelang pasca Agresi Militer Belanda II tahun 1948/1949.

Belanda berhasil menduduki Magelang selama kurang lebih satu tahun (Desember 1948 sampai dengan Desember 1949). Selama itu Belanda berhasil mengaspal jalan-jalan protokol yang sudah rusak sejak pendudukan Jepang, memperbaiki jembatan sungai Progo yang telah dihancurkan oleh pasukan TNI dan penduduk, dan merehabilitasi beberapa gedung yang mereka tempati, serta membuka kembali beberapa sekolah (Adiwiratmoko, 1998: 83).

Sementara itu permasalahan Indonesia-Belanda tengah menjadi pembicaraan yang hangat di dunia internasional. Sehari sesudah Belanda memulai penyerangannya, 20 Desember 1948, wakil AS di Dewan Keamanan PBB minta supaya Dewan menyelenggarakan sidang darurat. Dewan Keamanan mulai bersidang pada 22 Desember 1948 dan membicarakan usul resolusi bersama. Namun pihak Belanda menyatakan bahwa masalah yang terjadi di Indonesia merupakan masalah dalam negeri Kerajaan Belanda sendiri dan tidak boleh negara lain mencampurinya.

Dewan Keamanan segera bersidang lagi, yaitu pada tanggal 24 Januari 1949. Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh semua anggota, yakni:

1. Hentikan permusuhan
2. Bebaskan Presiden serta pemimpin-pemimpin RI yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948.
3. Memerintahkan kepada KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19 Desember 1948.

Sementara itu TNI dalam waktu kurang lebih satu bulan sudah selesai dengan konsolidasinya dan sudah mulai memberikan pukulan-pukulan kepada tentara Belanda. Pertama kali yang menjadi sasaran adalah garis-garis komunikasi Belanda, kawat-kawat telepon diputuskan, jalan kereta api dirusak, dan konvoi-konvoi Belanda di siang hari dihadang dan diserang (Poesponegoro, 1993: 161-162).

Pada tanggal 28 Januari 1949, PBB menerima baik resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat, Cina, dan Cuba. Resolusi tersebut dalam garis besarnya berisi anjuran kepada Republik Indonesia dan Belanda untuk menghentikan tembak-menembak, pembebasan semua tawanan politik dan dikembalikannya pembesar Republik Indonesia ke Jogjakarta serta pengembalian Jogjakarta pada Republik Indonesia (Notosusanto, 1973: 43).

Anjuran PBB tersebut tidak segera dilaksanakan oleh Belanda. Bahkan mereka berusaha mengulur waktu namun usaha itu tidak berhasil karena pertempuran di Jawa semakin besar dan lebih menguntungkan Republik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan serangan 1 Maret 1949 atas Jogjakarta. Dengan demikian Belanda merasa sudah terdesak kedudukannya baik di forum internasional maupun di Indonesia dalam menghadapi perlawanan gerilya oleh TNI dan rakyat. Akhirnya mereka bersedia untuk mengadakan pembicaraan pendahuluan dengan Republik Indonesia di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Perundingan dimulai di Jakarta tanggal 14 April 1949 dengan diketuai oleh Merle Cochran dari Amerika Serikat,

delegasi Indonesia oleh Mr. Muhammad Rum dan delegasi Belanda oleh Dr. Van Royen. Perundingan berlangsung sampai tanggal 7 Mei 1949.

Perundingan ini menghasilkan persetujuan yang kemudian dikenal dengan nama "Roem-Royen Statemen", yang isinya adalah:

1. Pengeluaran perintah oleh RI kepada kesatuan-kesatuan bersenjata RI untuk menghentikan perang gerilya, sedangkan pemerintah dan pimpinan-pimpinan RI dipulihkan kembali ke Jogjakarta.
2. Kerjasama dalam pemulihan perdamaian, dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
3. Belanda akan mendukung RI untuk menjadi negara bagian dari RIS dengan mempunyai sepertiga suara dalam Perwakilan federal.
4. Ikut serta dalam KMB di Den Haag untuk mempercepat penyerahan kedaulatan tanpa syarat, nyata dan lengkap (Moedjanto, 1988: 53).

Pasukan Belanda ditarik dari kota Jogjakarta mulai tanggal 24-29 Juni 1949 dan TNI pada tanggal 29 Juni 1949 mulai memasuki kota, tetapi di daerah-daerah selain Jogjakarta tetap masih terjadi pertempuran-pertempuran termasuk di Magelang. Batalyon Soeryosoempeno masih mengadakan serangan-serangan di kota-kota seluruh Kedu Utara yang diduduki Belanda, seperti di Grabag, Kranggan, Temanggung, Parakan sampai Wonosobo.

Setelah kota Jogjakarta dikuasai penuh oleh TNI, maka pada tanggal 6 Juli 1949 Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muh. Hatta kembali ke Jogjakarta. Penghentian tembak-menembak baru terlaksana di seluruh Indonesia setelah ada perintah dari Presiden selaku Panglima Tetinggi

Angkatan Perang RI melalui RRI Jogjakarta tanggal 3 Agustus 1949, dan perintah itu juga dilakukan oleh jenderal Soedirman Panglima Besar TNI. Pada hari yang sama AHJ. Levink Wakil Tertinggi Mahkota Belanda sebagai Panglima Tetinggi Angkatan perang Belanda di Indonesia juga memerintahkan kepada serdadu-serdadunya untuk meletakkan senjata.

Di Magelang untuk menyambut serah terima antara pihak Belanda kepada Indonesia, maka pemerintahan sipil dan militer sepakat mengadakan konferensi untuk persiapan serah terima dari militer ke sipil. Saat itu Bupati Magelang menggunakan rumah haji Marzuki di dusun Manggoran desa Bondowoso sebagai kantor pemerintahan sipil kabupaten Magelang. Selain digunakan sebagai kantor Pusat Pemerintahan Sipil Magelang, selama dua bulan H.A. Marzuki menjamin para pegawai dan pengungsi berupa nasi rangsum dua kali sehari (Pemda Kab. Magelang, 1974: 146). Pada awal mulanya Bupati Magelang ragu-ragu dalam melaksanakan tugas. Hal ini disebabkan karena adanya kabar bahwa patroli Belanda yang akan memasuki desa tersebut. Namun berkat saran Mayor Moerdiman yang mengatakan bahwa pada bulan Agustus 1949 antara pihak Indonesia dengan Belanda telah mengadakan gencatan senjata dan sebentar lagi akan diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Sehubungan dengan itu di rumah haji Marzuki itu pula antara pemerintah sipil dan militer mengadakan konferensi yang dihadiri kurang lebih 2000 orang. Hasilnya adalah:

1. Serah terima pemerintah militer kepada pemerintah sipil setelah pemerintahan militer kembali ke kota.

2. Mengangkat kembali Raden Moekahar Ronohadiwidjojo menjadi walikota Magelang (Priadji, hasil wawancara dengan Marzuki pada tanggal 22 September 1996).

Genjatan senjata telah dilakukan namun pasukan TNI belum bisa masuk kota karena Belanda belum ditarik dari kota Magelang. Baru setelah tanggal 27 Desember 1949, setelah naskah kedaulatan dari pemerintah Belanda ditandatangani di negeri Belanda oleh Perdana Menteri Dr. Williem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. AMJA. Sasen dan Ketua Delegasi RIS Drs. Moh. Hatta dan naskah penyerahan ditandatangani pada hari itu juga di Jakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota AHJ. Levink serta serdadu-serdadu Belanda ditarik dari Magelang maka pasukan TNI mulai masuk kota Magelang dan mendapat sambutan dari masyarakat dengan penuh kegembiraan dan kebanggaan. Sehubungan dengan itu secara otomatis pemerintah sipil terus mengambil alih dari pemerintahan militer. Hal ini sesuai dengan hasil konferensi Bondowoso. Dengan demikian semenjak memasuki kota Magelang, seluruh staf pemerintah sipil kabupaten maupun kota Magelang bertugas kembali (Priadji, 1997: 189).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kondisi geografis Magelang yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit sangat membantu rakyat Magelang dalam mengatur strategi perang, yaitu dengan strategi perang gerilya.
2. Semua badan-badan perjuangan Magelang dikerahkan ke seluruh front. Diantaranya ke front Ngablak, front Ngasinan, front Pingit, front Nglarangan (Grabag), front Candiroti, front-front di Surakarta, Semarang dan kota-kota lain. Tidak hanya terbatas pada front Jawa Tengah tetapi juga diperbantukan pada front di luar Jawa Tengah seperti di Purwakarta (Jawa Barat), di Karawang dan sebagainya.
3. Pada masa perang kemerdekaan, rakyat tidak hanya ikut memanggul senjata dalam perang tetapi juga membantu dalam bentuk materi, misalnya dengan mendirikan dapur umum untuk menjamin makanan bagi para gerilyawan. Serangan mendadak, pengrusakan gedung dan jembatan, penebangan pohon-pohon untuk menghadang datangnya pasukan Belanda dikerjakan oleh rakyat dengan bimbingan pasukan TNI. Di masa perang gerilya peranan rakyat sangat besar dalam menyediakan makanan bagi para gerilyawan. Di desa-desa terdapat kelompok-kelompok yang mengurus dapur umum. Biasanya sering disebut dengan istilah BOM (Bagian Oerosan Makanan). Dengan dikoordinir oleh istri kepala desa, maka masing-masing

dusun sudah mempersiapkan tempat-tempat pembagian makan maupun markas untuk sementara.

4. Belanda berhasil menduduki Magelang selama kurang lebih satu tahun. Setelah mendapatkan serangan yang terus menerus dari rakyat, akhirnya Belanda berhasil diusir dari Magelang. Kepergian Belanda dari Magelang juga seiring dengan hasil kesepakatan antara RI dengan Belanda tentang penyerahan kedaulatan RI dari Belanda ke republik Indonesia melalui persetujuan Roem-Royen. Di Magelang penyerahan pemerintahan dari militer ke sipil dilakukan setelah Belanda benar-benar pergi dari kota Magelang dan bersamaan dengan penandatanganan naskah kedaulatan dari pemerintah Belanda di Belanda, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949.

B. Saran

1. Kemerdekaan yang telah diraih Bangsa Indonesia tidak dengan mudah diperoleh namun butuh perjuangan dan pengorbanan yang besar dari para pejuang sehingga semestinya bagi kita untuk menghormati jiwa kepahlawanan mereka.
2. Hendaknya para remaja pada hkusunya dan masyarakat Indonesia pada umumnya bercermin pada semangat kepahlawanan para pejuang terdahulu sehingga kita mampu menjadi pribadi yang penuh semangat untuk maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwiratmoko, Soekimin dkk. 1998. *Sejarah Perjuangan asyarakat Kota Magelang di Masa Perjuangan Fisik Tahun 1945-1950*. Magelang: DHC Angkatan '45
- Dekker, Nyoman. 1986. *Sejarah Revolusi Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press
- Kansil, CST dan Julianto, MA. 1968. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Kahin. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan
- Lapian, AB. 1996. *Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959*. Jakarta: Depdikbud RI
- Masjkuri dan Sutrisno Kutoyo, 1976. *Sejarah Daerah Istimewa Jogjakarta*. Jogjakarta: Depdikbud
- Moehkardi.1983. *Magelang Berjuang*. Magelang: Angkatan Darat
- Moedjanto, MA. 1988a. *Indonesia Abad ke-20 (jilid 1), dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggajati*. Jogjakarta: Kanisius
- 1988b. *Indonesia Abad ke-20 (jilid 2), dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai Pelita III*. Jogjakarta: Kanisius
- Nasution,AH. 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia (jilid 2)*. Bandung: Angkasa
- 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan jilid 2, jlid 5 Jilid 9 Periode Agresi Militer Belanda I*. Bandung: Angkasa
- 1979. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. (Jilid 9). Agresi Militer Belanda II*. Bandung; Disjarah AD dan Angkasa
- Notosusanto, Nugroho. 1971. *Ikhtisar Sejarah RI (1945-Sekarang)*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI.

- 1973. *Markas Besar Komando Djawa*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI.
- Pemda Kabupaten Magelang. 1974. *Naskah Sekitar Perjuangan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang*. Magelang: Pemda Kab. Magelang
- Poesponegoro, Marwati Djonet dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: PN. Balai Pustaka
- Priadji.1997. *Perjuangan Komando Distrik Militer Magelang Pada Masa Revolusi Fisik Tahun 1948-1949*. Skripsi Jurusan Sejarah Unnes Semarang
- Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro.1968. *Sirnaning Jakso Katon Gapuraning Ratu*. Semarang: Yayasan Diponegoro
- 1977. *Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdiannya*. Semarang: Yayasan Diponegoro
- 1978. *Napak Tilas Route Gerilya GM II/ Dmi II Kolonel Gatot Subroto, Sedapi*
- Simatupang, TB. 1980. *Laporan dari Banaran, Kisah Pengalaman Seorang Prajurit selama Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sumarmo, AJ. 1991. *Pendudukan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Tobing, KML. 1986. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia, Renville*. Jakarta: Gunung Agung.
- Widja, I Gde. 1989. *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Dirjen Dikti.

